

**PROTEKSI PEMERINTAH DESA TERHADAP EKSISTENSI USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN NGLINDUR,
KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh :

MARCHO VAN AKUB DENDO
19520029
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Oktober 2023

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Utami Sulistiana, S.P., M.P
Ketua Penguji/Pembimbing



Dra. B. Hari Saptaningtyas, M.Si
Penguji Samping I

Analius Giawa, S.IP., M.Si
Penguji Samping II

YOGYAKARTA

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marcho Van Akub Dendo

NIM : 19520029

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PROTEKSI PEMERINTAH DESA TERHADAP EKSISTENSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN NGLINDUR, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila nanti di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Penulis



Marcho Van Akub Dendo
19520029

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena hanya atas izin dan karuniaNya sehingga saya bisa dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk semua orang yang sangat berarti bagi saya:

1. Untuk kedua Orang Tua saya Bapak Daniel Dendo Ngara (Alm) dan Ibu Maria S. Savio orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk sebuah berkat doa dan dukungan Bapak dan Mama sehingga saya bisa berada di titik ini. Untuk Bapak damai selalu disana dan jadilah pendu'a untuk kami istri dan anak-anakmu, untuk Mama sehat selalu dan harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Untuk kakak dan Adik-adikku tercinta, Martha Ina Dendo, S.Kep.Ns, Alfred E. Nyong Rohy, S.Kep.Ns, Pratu Mario Viegas T.M. Dendo, Melinda Savio Dendo, Kamelia Neva Bulu. Yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan do'anya untuk keberhasilan ini, terima kasih dan sayangku untuk kalian.
3. Untuk Dosen Pembimbing saya Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P. terima kasih telah membimbing saya dengan menyumbangkan pikiran, waktu, pengetahuan dan yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Untuk Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Nglindur, terima kasih telah memberikan izin dan membantu saya dalam melakukan penelitian di Nglindur.
5. Untuk orang terdekat Anifaturohmy, dan kawan-kawan saya, Hendrik, Susan, Nelson, Anhar, Mia, Bolsen, Petrus, Adven, Irene, Bang Vian, Taufik. Terima kasih telah membantu saya dengan memberi dukungan, do'a, saran, dan semangat hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Untuk seluruh keluarga besar Dendo Suku Weekowa, terima kasih yang selama ini telah memberikan dukungan berupa do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Selama ada niat dan keyakinan semua akan jadi mungkin”

(Marcho Dendo)

“dan bergembiralah karena TUHAN; maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang di inginkan hatimu”

(Mazmur 37:4)

“Tak selamanya langit itu kelam suatu saat akan cerah juga hiduplah dengan sejuta harapan habis gelap akan terbit terang”

(Rhoma Irama)

“Hasil tertinggi pendidikan adalah toleransi”

(Helen Keller)

INTISARI

Penelitian ini akan mengkaji tentang Proteksi Pemerintah Desa Terhadap Eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini berangkat dari adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan salah satu potensi yang paling dominan dan berperan penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat yakni UMKM. UMKM ini merupakan salah satu penyumbang perkembangan perekonomian Indonesia, karena dengan adanya potensi UMKM di Kalurahan Nglindur tersebut, di harapkan mampu mendobrak perekonomian masyarakat sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat nglindur. UMKM ini sudah menjadi salah satu mata pencarian masyarakat khususnya bagi pelaku usaha. Namun yang menjadi permasalahan yakni Pemerintah Kalurahan Nglindur sendiri belum memberikan pelatihan, pembinaan, pengawasan dan juga memfasilitas belum dilakukan secara optimal sesuai kebutuhan para pelaku usaha. Sehingga menimbulkan persoalan yakni tampilan atau kemasan produk masih kurang menarik, minimnya pengetahuan terkait strategi marketing dan juga produk usaha yang ditawarkan di pasar tersebut belum mampu bersaing dengan produk-produk usaha yang lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Proteksi Pemerintah Desa Terhadap Eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Eksploratif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengeksplorasi proteksi pemerintah desa terhadap eksistensi UMKM melalui potensi yang dimiliki Di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nglindur. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitiannya terdiri dari, Pemerintah Kalurahan 4 orang, pengurus dan pelaku usaha 3 orang serta tokoh masyarakat 1 orang dan masyarakat 1 orang. Teknis analisis data menggunakan analisis data secara kualitatif eksploratif yakni pengumpulan data dari informan, teknik analisis data dengan cara; reduksi data, triangulasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian tentang Proteksi Pemerintah Desa Terhadap Eksistensi UMKM menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan telah memfasilitasi para pelaku usaha dengan memberikan kesempatan untuk mempromosikan hasil produk lewat event-event baik yang dilaksanakan di Kapanewon Girisubo, maupun di Alun-alun Kota Wonosari dan juga pemerintah menyediakan area pemasaran produk usaha di Rest Area Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang berada di Kalurahan Nglindur.

Kata Kunci: Proteksi, Eksistensi, UMKM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat serta penyertaannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PROTEKSI PEMERINTAH DESA TERHADAP EKSISTENSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN NGLINDUR, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

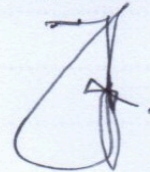
Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus di penuhi oleh Mahasiswa agar memperoleh gelar sarjana satu (S1) dari kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa” APMD Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Sehingga bantuan dan dukungan dari semua pihak sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan ucapan limpah terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa,S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

4. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi dan arahan selama penulis belajar di STPMD “APMD”
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Terimakasih atas semua ilmu yang telah Bapak dan Ibu dosen berikan. Dan semoga penulis dapat mempergunakan ilmunya dengan baik.
6. Karyawan-karyawan yang ada di STPMD “APMD” yang telah melayani kami dengan sepenuh hati dalam segala bentuk kebutuhan kami.
7. Pemerintah Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang telah memberi kesempatan izin penelitian kepada penulis.
8. Kawan-kawan seperjuangan dari Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” khususnya angkatan 2019, yang selalu bersama-sama dalam suka maupun duka.

Yogyakarta, 30 Januari 2024



Marcho Van Akub Dendo
NIM: 19520029

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
INTISARI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Akademis	5
2. Manfaat Praktis	5
F. Literatur Review	5
G. Kerangka Konseptual.....	13
1. Proteksi	13
2. Pemerintah Desa	14
3. Eksistensi`	16
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	18
H. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Unit Analisis.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data	21

4. Teknik Analisis Data	23
BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGLINDUR DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM).....	25
A. Sejarah Kalurahan Nglindur	25
B. Kondisi Geografis	27
C. Kondisi Demografis.....	29
D. Sosial Ekonomi.....	33
E. Sarana dan Prasana	34
F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	35
BAB III ANALISIS PROTEKSI PEMERINTAH DESA TERHADAP EKSISTENSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN NGLINDUR, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.	43
A. Proteksi pemerintah desa terhadap keberadaan UMKM di Kalurahan Nglindur:.....	43
B. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Proteksi Pemerintah Desa Terhadap Eksistensi UMKM Di Kalurahan Nglindur.	49
C. Pemberdayaan pelaku UMKM melalui potensi yang ada serta meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing di Kalurahan Nglindur	
53	
BAB IV KESIMPULAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
PANDUAN WAWANCARA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Daftar Penduduk Berdasarkan Usia	30
Table 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	31
Table 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	32
Table 2. 4 Data Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	41

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Nglindur
Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul 28
- Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi dengan ekonomi yang berskala besar di dunia, karena Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, sumber daya manusia, stabilitas makro ekonomi dan investasi yang kondusif melalui pemberdayaan khususnya dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM adalah satu sektor ekonomi berpotensi mengatasi guncangan krisis ekonomi dalam menjalankan UMKM agar mendapatkan hasil yang maksimal dapat memanfaatkan teknologi informasi melalui media sosial yang telah disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa. Untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan perlu adanya pendidikan dasar serta pengembangan pendidikan vokasi dengan berfokus pada pendidikan kewirausahaan untuk menciptakan wirausahawan baru.

Usaha mikro kecil menengah dimaknai sebagai usaha perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang berada di tingkat desa, yang berpatokan pada kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat dideskripsikan sebagai bisnis atau usaha individu atau rumah tangga yang badan usahanya berukuran kecil, Pengelolaan UMKM sendiri didasari oleh batasan omset pendapatan pertahun. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.

Usaha Mikro Menurut Rudjito, usaha mikro merupakan bisnis kecil. Meskipun berskala kecil, namun bisnis tersebut mampu membantu roda perekonomian negara. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rudjito yang merupakan Dirut BRI yang menjabat pada tahun 2000-2005 (Zia Auralia et al., 2023:118-128). Usaha mikro juga mampu membangun lapangan kerja bagi masyarakat luas. Efek positif yang dihasilkan juga mampu meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha di tingkat desa melalui UMKM.

Peneliti memilih lokasi penelitian yaitu di Kalurahan Ngelindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Peneliti memilih Kalurahan Ngelindur sebagai tempat penelitian karena adanya persoalan yang menjadi kendala khususnya pada UMKM. Untuk UMKM itu sendiri di Kalurahan Ngelindur terdiri 8 UMKM di setiap padukuhan antara lain: Padukuhan Ngelindur Wetan (Olahan Minuman Jahe Emprik), Padukuhan Ngepoh (Stick Pisang), Padukuhan Kulon (Jenang), Padukuhan Gangsalan Kidul (Krecek Telo), Padukuhan Gangsalan Lor (Wingko Babat), Padukuhan Wuni (Kripik Talas), dan Padukuhan Tekik (Kacang Oven). Ini yang perlu di proteksi oleh pemerintah dalam hal memfasilitasi dan memberikan pelatihan untuk pengembangan UMKM di Kalurahan Ngelindur terkait untuk kemajuan ekonomi dalam usaha. Di Kalurahan Ngelindur seperti belum adanya pasar untuk menjual hasil produksi Selama ini UMKM tidak menggunakan sistem manajemen pemasaran secara khusus, penjualan produk yang dilakukan biasanya hanya dipajang di toko pemilik produk serta sesekali di acara-acara khusus seperti acara pameran yang dilakukan oleh dinas ataupun instansi yang membina UMKM. Hal ini tentu saja menjadi hal yang biasa kita lihat di lingkungan pedesaan saat ini di mana karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari pelaku UMKM. Selain itu pembinaan yang dilakukan oleh instansi terhadap UMKM yang masih kurang baik dan

tidak merata, faktor lain yang menyebabkan pemasaran produk di dalam lingkup pedesaan saja yaitu karena masih banyak pelaku UMKM yang belum membuka diri terhadap informasi yang ada dan masih kurang menariknya kemasan produk UMKM. Selain itu UMKM di Kalurahan Nglindur memiliki produk unggulan yaitu minuman jahe instan atau biasa disebut jahe emprit dan kacang oven yang sudah berlabel halal. Akan tetapi adapun kelebihan yang dimiliki oleh UMKM Kalurahan Nglindur yaitu mutu produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik dan enak. Dari permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti dapat dilihat bahwa Kalurahan Nglindur memiliki potensi yang cukup baik dari segi ekonomi yang dapat dimanfaatkan di bidang UMKM, namun diluar itu perlu adanya perhatian dari pemerintah desa setempat untuk memberdayakan setiap pelaku UMKM khususnya dalam melindungi setiap produk yang dihasilkan agar dapat didistribusikan seluasnya dan mampu bersaing di pasar. Upaya pemasaran UMKM dipengaruhi oleh informasi lingkungan UMKM seperti pesaing, masyarakat, dan pelanggan. Komunitas tempat seperti pemerintah Desa perlu memperhatikan UMKM karena UMKM sendiri bisa menjadi potensi ekonomi untuk menambah pendapatan asli desa, serta menjaga eksistensi UMKM yang ada. Seperti yang diketahui bahwasanya UMKM yang dijalankan baik itu perorangan maupun kelompok biasanya memproduksi barang dagangannya apabila ada pesanan atau orderan permintaan, sehingga pada hari-hari biasanya produksi bisa saja tidak dilanjutkan. Pemerintah perlu menanamkan semangat dan konsisten kepada pelaku UMKM serta memberikan akses pasar yang lebih luas agar hal ini menjadi salah satu motivasi bagi pelaku UMKM untuk terus eksis.

Maka penelitian menggunakan konsep Governing dalam Mazhab Timoho sebagai kacamata untuk melihat bagaimana perbuatan pemerintah, aktivitas pemerintah, strategi, peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang tentu saja dapat berdampak pada desa khususnya UMKM itu sendiri. Pemerintah perlu memberikan fasilitas berupa akses dan

sarana prasarana kepada pelaku UMKM seperti yang diketahui bahwa perlu adanya ijin usaha yang legal untuk UMKM agar dalam pemasaran produknya dapat dipasarkan lebih luas lagi. Peluang lainnya datang dari Indomaret, Indomaret adalah salah satu minimarket yang banyak tersebar di Indonesia, Selain itu, Indomaret juga menyediakan kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasukkan produknya agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Dalam hal penerimaan produk Indomaret akan melakukan berbagai macam tahapan dalam rangka memastikan bahwa produk tersebut benar-benar berkualitas baik dan layak untuk dijual.

B. Fokus Penelitian

1. Kebijakan pemerintah desa terhadap keberadaan UMKM di Kalurahan Nglindur.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proteksi pemerintah desa terhadap eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur.
3. Pemberdayaan pelaku UMKM melalui potensi yang ada serta meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing di Kalurahan Nglindur.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah, “Bagaimana Proteksi Pemerintah Desa Terhadap Eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi proteksi pemerintah desa terhadap eksistensi UMKM melalui potensi yang dimiliki Di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nglindur.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat akademis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuawan khususnya ilmu pemerintahan mengenai proteksi pemerintah desa terhadap eksistensi UMKM desa.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah desa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan evaluasi untuk Pemerintah Kalurahan Nglindur agar dapat mengembangkan potensi perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya itu, dalam proteksi pemerintah desa terhadap eksistensi UMKM desa diharapkan pemerintah desa bisa mewujudkan kemandirian desa.

F. Literatur Review

Literatur Review adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan untuk menghindari plagiasi:

Pertama, Penelitian dilakukan oleh Saidatul Akida Dkk (2022) dalam jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) Volume 2, Nomor 2 dengan judul “Keberadaan BUMDes Suka Jaya Dalam Pelayanan Masyarakat”. Dalam pengembangan tata kelola badan usaha milik desa, perlu adanya sinergi lebih lanjut untuk merumuskan sebuah Standar Operating Procedur (SOP) agar menjadi pedoman pelaksanaan setiap UMKM yang ingin menjual produknya atau menitipkan produknya kepada BUMDes. Selanjutnya badan usaha milik desa dapat memasarkan produknya kepada *e-commerce*, agar aktivitas pasar jual beli menjadi lebih luas tidak hanya bergelut di satu daerah saja.

Dengan demikian badan usaha milik desa dapat memberikan multiplier effect bagi seluruh masyarakat Desa Suka Jaya.

Kedua, Penelitian dilakukan oleh Novia Kencana Dkk (2019) dalam jurnal Pemerintahan dan Politik Volume 4, Nomor 2 dengan judul “Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pertumbuhan Ekonomi Lokal pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Ujanmas Baru Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dapat dilakukan pemerintah desa yakni: 1) Meningkatkan permodalan dan peminjaman modal untuk pengusaha industri; 2) Memperluas jaringan pemasaran batu bata dengan mempromosikan melalui media sosial maupun media cetak sebagai penunjang pengembangan industri batu bata tersebut; 3) Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dengan cara lebih banyak melakukan dan memberi pelatihan bagi tenaga kerja yang tersedia; 4) Mensosialisasikan dan mendaftarkan pemilik industri batu bata yang belum terdaftar supaya terjamin legalitasnya serta mendapat perlindungan hukum dan meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga maupun stakeholder untuk membantu keterbatasan permodalan dan keuangan.

Ketiga, Penelitian dilakukan oleh AAA. Ngr. Sri Rahayu Garda (2020) dalam jurnal Parta Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1, Nomor 1 dengan judul “Sosialisasi Hak Cipta dan Hak Merek pada Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar)”. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha kecil terhadap hak merek dan hak cipta, serta upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada kelompok usaha kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan hukum dan pendampingan pendaftaran hak

merek dan hak cipta. Hasil penyuluhan mengemukakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta dan hak merek masih rendah oleh karena itu perlu ada upaya perlindungan hukum bagi para UKM yang ada di Kabupaten Gianyar.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Muksin Dkk (2016) dalam jurnal e-skripsi Universitas Andalas dengan judul “Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kota Padang; Masalah dan Solusi Pada Usaha Sulaman dan Bordiran”. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya. Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut dan memberikan kontribusi yang positif kepada perekonomian bangsa di saat itu. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UKM. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya keberadaan UKM, yaitu pertama karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua sebagai bagian dari dinamika, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar (Berry, 2001). Lebih lanjut, usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga (Kuncoro, 2000). Krisis ekonomi memberi pelajaran berharga tentang kekuatan bangunan struktur usaha Indonesia. Usaha besar yang melalui strategi industri substitusi impor pada periode 1970-1985 dan dilanjutkan strategi industri promosi ekspor mulai 1985 diharapkan memberikan efek yang berarti ternyata, hanya melahirkan bangunan stuktur industri yang rapuh, usaha besar yang jumlahnya sedikit namun menguasai lebih dari 70% total asset usaha di Indonesia. Sementara usaha kecil dengan jumlah 3 yang sangat besar tidak mengalami imbas dari

penguasaan asset dan perkembangan yang dialami usaha besar. Namun ketika krisis terjadi pada perekonomian Indonesia, terbukti usaha besar yang lebih rapuh daya tahannya terhadap krisis. Keberadaan usaha menengah sebagai salah satu pilar UKM yang harusnya sudah lebih mandiri dan menjadi pendorong skala usaha di bawahnya menjadi dilupakan. Akibatnya usaha menengah menjadi terbiasa dengan proteksi, captive market dan menginginkan berbagai fasilitas yang disertai dengan manajemen yang tradisional membuatnya sulit berkembang.

Kelima, penelitian dilakukan oleh Dendi Apriliyanto Handika Putra dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumenep”. Dalam mengembangkan UKM, terdapat beberapa permasalahan seperti lemahnya struktur permodalan dan akses sumber daya modal seperti; minimnya bahan baku; sumber daya dan pencapaian teknologi yang terbatas; kelemahan organisasi dan kurangnya kuantitas dan kualitas manajemen sumber daya manusia yang dimiliki. Solusi alternatifnya adalah mendorong lembaga ekonomi pedesaan yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara peran pemerintah dan masyarakat. Kerja sama tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat pada khususnya. Kerja sama tersebut harus bertindak sebagai lembaga bisnis di kabupaten Sumenep dan sebagai pelaksana dalam memasarkan produk UKM.

Keenam, penelitian dilakukan oleh Fathatur Rohmah Dkk Volume 3 Nomor 12 dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo).” Proses pembangunan yang dilakukan melalui pemberdayaan UMKM. Strategi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo yang dalam pelaksanaannya diwakili Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan

pengolah mangga dan meningkatkan volume UMKM olahan mangga yang merupakan salah satu produk unggulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinkop UKM merupakan pelaksana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal manajerial usaha, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar dan dukungan kemudahan dalam perijinan. Sedangkan DISPERINDAG merupakan pelaksana strategi dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal mengelola mangga dan perluasan akses pasar. Faktor pendukung dalam pemberdayaan adalah dukungan dana dari pemerintah dan klinik konsultasi bisnis, sedangkan faktor penghambat adalah bahan baku musiman dan kualitas sumber daya manusia yang kurang.

Ketujuh, penelitian dilakukan oleh Simunawir Sitoro (2022) dengan judul “Identifikasi Dan Strategi Pengembangan UMKM Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan strategi pengembangan UMKM yang dilakukan Pemerintah di Kecamatan Bengalon. Untuk itu dilakukan penelitian pada sepuluh UMKM dengan berbagai bidang usaha yang berbeda. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa permasalahan yang dihadapi UMKM Kecamatan Bengalon meliputi bidang permodalan, pemasaran, produksi dan teknologi penunjang produksi. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan diantaranya melalui pelatihan manajemen, pelatihan teknis produksi dan peran perusahaan untuk mendapatkan pengembangan sarana produksi serta modal. Bantuan dari lembaga non pemerintah seperti program *corporate social responsibility* (CSR) kepada enam UMKM berupa pelatihan dan bantuan tambahan mesin produksi serta pendampingan usaha. Strategi yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Kedelapan, penelitian dilakukan oleh Gustna Siregar dkk. dengan judul “Model Pengembangan Komoditas dan Jenis Usaha Unggulan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)”. Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian pada tahun 2015. Populasi penelitian ini adalah komoditas dan Jenis Usaha UMKM yang bergerak di sektor ekonomi di Kota Tanjungbalai. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive random sampling. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka penelitian secara keseluruhan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*research and development*). Sesuai model pendekatan *research and development (R&D)* maka pelaksanaan penelitian ini mengikuti langkah-langkah antara lain: survei pendahuluan, wawancara mendalam (*indepth interview*), *Focus Group Discussion (FGD)*, perencanaan model, uji model, validasi model dan sosialisasi. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi kuesioner, pencatatan dokumen dan tes. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, analisis SWOT, analisis Borda, Bayes, serta *Product Life Cycle (PLC)* Peranan perbankan dalam pengembangan UMKM komoditi unggulan Kota Tanjung Balai berupa pemberian kredit dengan skim KUR. Jumlah kredit yang disalurkan cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor internal perbankan maupun pengusaha UMKM. Daur hidup produk (*Product Life Cycle*) kategori prospek baik dan potensi tinggi adalah; pengasinan ikan, jasa keuangan, pedagang hasil perikanan, budi daya kerang, penangkapan ikan di laut, industri tepung ikan; prospek cukup dan potensi sedang: budi daya ikan di tambak, pisang; prospek baik dan potensi sedang: pedagang hasil pertanian dan mini market. Berdasarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan maka rancangan strategi disesuaikan dengan potensi daerah yaitu perdagangan dan industri yang berbasis pada sumberdaya laut. Model pengembangan alternatif bagi pengembangan UMKM diharapkan melalui pembentukan cluster melalui penguatan sistem agribisnis mulai dari hulu hingga hilir (*Value Chain Agribusiness*).

Kesembilan, penelitian ini dilakukan oleh Ana Dhaoud Daroin (2015) dengan judul “Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Handycraft Kayu Jati di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kapupaten Bojonegoro”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Upaya pengembangan UMKM *handycraft* kayu Jati di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dari aspek produksi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) Upaya pengembangan UMKM *handycraft* kayu Jati di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dari aspek pemasaran untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Tahap analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan.

Kesepuluh, penelitian ini dilakukan oleh Anggelina dkk. (2022) dengan judul “*Governabilitas* Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa mempunyai peranan yang penting dalam mengurus wilayahnya, salah satunya yaitu dalam memperhatikan dan melayani kepentingan masyarakat desa. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan *governabilitas* atau kapasitas dari pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan UMKM yang ada di Kalurahan Wonokerto melalui penyelenggaraan program pengembangan untuk pelaku UMKM. Pengembangan UMKM dilakukan dalam rangka untuk memberdayakan atau membawa suatu perubahan terhadap level usaha ke arah yang lebih baik melalui

peningkatan perluasan usaha, kualitas produksi, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Untuk itu, governabilitas pemerintah Kalurahan Wonokerto menjadi tolak ukur keberhasilan UMKM untuk terus tetap bertahan dan berkembang dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Wonokerto belum maksimal? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif. Obyek dalam penelitian ini adalah terkait kapasitas pemerintah Kalurahan Wonokerto. Sedangkan, subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Wonokerto, Pengurus UMKM dan Pelaku UMKM. Pada penelitian ini jumlah informan yaitu terdiri dari 6 orang. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *governabilitas* pemerintah kalurahan dalam mendorong pengembangan UMKM belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan, pelatihan yang disediakan kurang variatif sesuai dengan kebutuhan UMKM, alat yang digunakan untuk menunjang proses produksi masih terbatas, belum adanya upaya dari pemerintah kalurahan untuk membantu mengatasi keterbatasan modal, serta pelaku UMKM yang kurang mengembangkan potensi diri. Sementara itu, hambatan pemerintah kalurahan dalam mendorong pengembangan UMKM yaitu dikarenakan lemahnya pemasaran, banyaknya produk yang dihasilkan tidak diimbangi dengan kemampuan dalam memperluas akses pasar, sehingga lemahnya akses pasar ini berdampak pada sempitnya peluang pasar bagi UMKM.

Secara umum, kesepuluh penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada topik penelitian dimana baik penelitian terdahulu maupun

penelitian ini berupaya mengungkap perberdayaan masyarakat oleh UMKM. Namun, kesepuluh penelitian di atas tetap memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini secara khusus membahas dan menjelaskan strategi pemasaran UMKM yang dipengaruhi oleh lingkungan UMKM seperti pesaing, masyarakat, dan pelanggan guna meningkatkan kesejahteraannya.

Hal lain yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan. Penelitian ini dipandu oleh teori *Governing* sebagaimana yang diajarkan dalam Mazhab Timoho. Dengan memakai teori *Governing*, penelitian ini hendak mengungkap bagaimana perbuatan pemerintah, aktifitas pemerintah, strategi, peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berdampak pada pengembangan desa khususnya UMKM.

G. Kerangka Konseptual

1. Proteksi

Proteksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri atau industri baru agar dapat bersaing dengan produk impor. Proteksi adalah upaya perlindungan pada diri yang didalamnya meliputi keuangan dan kesehatan. Pada dasarnya proteksi sangat berguna untuk masa depan Anda dan kondisi darurat, seperti sakit, kerugian, pensiun atau meninggal dunia. (Anggraeni, 2017 : 62).

Proteksi disebut juga proteksionisme adalah kebijakan pemerintah yang membatasi perdagangan internasional sebagai upaya membantu industri dalam negeri. Kebijakan proteksi bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi domestik dan untuk mengatasi masalah keamanan atau kualitas. Proteksi menjadi salah satu hal yang kerap kali ada saat membeli sebuah barang atau jasa tertentu. Proteksi atau yang lebih

kita kenal dengan nama perlindungan menjadi hal penting yang tak boleh dilupakan saat melakukan transaksi perdagangan. Semakin bernilai atau semakin mahal harga dari barang atau jasa yang dibeli, tingkat proteksinya juga semakin tinggi. (Iverson & Dervan, n.d. 2023 : 7823-7830).

Tujuan utama dari adanya proteksi dalam industri perdagangan adalah untuk melindungi barang yang akan dijual dari risiko tertentu. Misalkan, terjadinya kerusakan pada produk yang dijual atau hilangnya barang selama proses pengiriman berlangsung. Risiko lain yang kerap terjadi adalah rusaknya barang akibat ledakan, bencana alam, sambaran petir, kebakaran, hingga pencurian.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa proteksi yaitu bagaimana usaha untuk mambatasi atau melindungi sesuatu agar berjalan dengan baik.

2. Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Adapun, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa berpusat di kantor desa. Adapun, kantor desa menjadi pusat pelayanan warga desa dengan berbagai macam urusan. Misalnya, pengajuan pembuatan KTP, pembuatan akta tanah, pembuatan akta kelahiran dan kematian, penyaluran program pemerintah, tempat pelaksanaan posyandu, pendaftaran pernikahan dan lain sebagainya.

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: “Pemerintah

Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”

Struktur pemerintahan desa Struktur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Adapun, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa yang diawasi oleh BPD, terdapat juga lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan menjadi mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Berikut struktur pemerintah desa, yang terdiri dari:

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi. Perangkat Desa diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat Desa, terdiri dari:

- 1) Sekretaris Desa; Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

- 2) Kepala Urusan (Kaur); Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Kepala Seksi (KASI); Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- 4) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya; berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Pada bagian ini ada dua yakni Kepala Dusun (Kadus) dan Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT).
- 5) Dusun; merupakan gabungan dari beberapa RT, sedangkan sebuah desa memiliki beberapa Dusun. (Kompas.com/SILMI NURUL UTAMI)

Menurut pemaparan di atas, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh aparatur desa untuk menjalankan pemerintahan desa. Guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

3. Eksistensi`

Eksistensi adalah keberadaan dan berkembang. Secara umum, eksistensi adalah suatu cap bagi keberadaan manusia dan hanya manusia yang memiliki keberadaan. Istilah eksistensi ini bisa diartikan dari berbagai sudut pandang, tergantung konteks yang dibicarakan. Eksistensi berasal dari kata Latin yaitu *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, dan memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari kata *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian mengenai eksistensi yang dibagi menjadi empat pengertian. Pengertian yang *Pertama*, eksistensi adalah apa yang ada. *Kedua*, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas.

Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. *Keempat*, eksistensi adalah kesempurnaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian eksistensi adalah keberadaan atau ada. Sedangkan menurut Sjafrinah dan Prasanti, pengertian eksistensi adalah keberadaan. Di mana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidaknya kita. Sementara itu, menurut Alfianto, pengertian eksistensi adalah paham yang cenderung memandang manusia sebagai objek hidup yang memiliki taraf yang tinggi, dan keberadaan dari manusia ditentukan dengan dirinya sendiri bukan melalui rekan atau kerabatnya, serta berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang dapat eksis.

Menurut Sjafrinah dan Prasanti (2016:3-4), eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi ini perlu “diberikan” orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan atau kita diakui. Masalah keperluan akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena ini merupakan pembuktian akan hasil kerja atau performa di dalam suatu lingkungan.

Selain itu, eksistensi diri juga sangat terkait erat dengan kesadaran diri untuk terus dan konsisten mengarahkan dan menggunakan akal sehat sebagai mesin yang selalu memproduksi partikel-partikel kebaikan, berada dalam garis nurani kemanusiaan. Oleh karena itu, eksistensi diri tidaklah berdiri sendiri, melainkan terdapat banyak unsur eksternal-internal yang mempengaruhinya.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa eksistensi adalah keberadaan yang diakui dan menonjol. Serta memiliki dampak positif bagi sekitar.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.

Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya, hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

UMKM adalah usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha dengan kekayaan dan omzet yang tidak lebih dari Rp 500 juta per tahunnya. Dengan kata lain, pendapatan yang dihasilkan oleh setiap pelaku usaha yang menjalankannya juga masih tergolong kecil (Fidilla Kurnia, 2022). Ukuran sebuah usaha tentu saja menggunakan jumlah omzet yang didapat dari bisnis tersebut. Selain itu, jumlah aset yang dimiliki dan karyawan yang dipekerjakan dalam bisnis tersebut juga menjadi acuan dalam penentuannya. Usaha yang memiliki kekayaan yang sudah sangat besar tentu saja tidak bisa lagi dikategorikan sebagai UMKM. Sebut saja usaha milik negara, usaha milik swasta yang punya omzet tinggi, usaha patungan, dan usaha milik asing yang beroperasi di Indonesia. Usaha UMKM mempunyai peranan yang penting, antara lain:

a. Mendorong Pemerataan Ekonomi

Dengan adanya UMKM, memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk memperbaiki ekonomi mereka. Usaha dengan modal yang dapat dijangkau oleh sebagian masyarakat Indonesia, membuat usaha ini sangat populer, bahkan di saat pandemi seperti sekarang ini. Bagi Anda yang ingin membuka usaha UMKM, ketahui Izin Usaha Mikro Kecil.

b. Membuka Kesempatan Kerja

Usaha UMKM, juga berperan membuka lapangan kerja. Hal ini sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Dengan demikian, memperbaiki taraf ekonomi masyarakat.

c. Menyumbang Devisa Negara

Jangan salah bila usaha UMKM hanya kecil-kecilan. Di era digital seperti saat ini, pelaku UMKM dengan mudah menjangkau konsumen asing. Hal ini tentunya mendorong kegiatan ekspor yang dapat menyumbang devisa negara.

d. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

UMKM tersebar sampai ke pelosok daerah. Keadaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat di pelosok daerah untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa UMKM adalah usaha yang dimiliki masyarakat desa dan difasilitasi oleh pemerintah desa dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **kualitatif eksploratif**. Menurut Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif eksploratif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu

atau kelompok dalam menanggapi masalah sosial atau manusia. Eksploratif adalah penelitian awal yang digunakan untuk memperjelas apa sebenarnya masalah yang perlu diperjelas apa sebenarnya masalah yang perlu diselesaikan dan bagaimana penelitian selanjutnya harus dilakukan.

2. Unit Analisis

Unit Analisis adalah satuan yang diteliti yang berkaitan dengan benda, individu, kelompok, sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005: 75-76). Unit analisis dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian.

a. Obyek Penelitian

Menurut pendapat Arikunto, yang mengartikan bahwa objek penelitian adalah sesuatu perihal yang akan dilakukan penelitian guna tujuan tertentu. Penentuan objek penelitian adalah bagian dari inti dari problematika penelitian.

Objek penelitian memang hal yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian. Menurut Husein, objek penelitian tidak sekedar melakukan penelitian, melainkan menentukan siapa yang akan dijadikan objek penelitian itu sendiri. Termasuk pula memperhatikan dimana penelitian tersebut akan dilakukan dan kapan. Husain umar juga mengizinkan peneliti untuk menambahkan hal-hal yang seperlunya ditambahkan. (Salma,2023)

Dari penjelasan diatas, maka penelitian ini menggunakan obyek penelitian proteksi pemerintahan Kalurahan Nglindur terhadap eksistensi UMKM.

b. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka penentuan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862)

Dari uraian diatas, subyek penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kalurahan Nglindur, BPD, Anggota UMKM, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.

c. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan (Arifa. A 2023). keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Adapun informan sebagai berikut:

Table 1.1 Daftar Informan

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
M.Hanan Amsori, S.IP	Lurah	L	51	S1
Rina Nur Hasanah ,S.Pd	Carik	P	35	S1
Totok Wahyudi	Danarta	L	34	SMA
Drs. Sugeng Wibowo, M.Pd.I	Ketua BPD	L	56	S2
Surami	Ketua UMKM	P	46	SLTA
Sulastri	Anggota UMKM	P	46	SLTA
Karsini	Anggota UMKM	P	43	SLTA
Suranta	Tokoh Masyarakat	L	51	SLTA
Rena Tri Nur Widyastuti	Masyarakat	P	34	SMK

Sumber:Penulis Tahun 2023

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada sebuah penelitian, teknik pengumpulan data perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan atau sesuai fakta, sehingga penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Sugiyono (2014:145) merupakan teknik pengumpulan data yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Lebih

lanjut, (Moleong, 2010) observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di tempat penelitian, peneliti mengamati proteksi pemerintah desa terhadap eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur.

b. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau pihak yang mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dan dilakukan dengan maksud tertentu. (Moleong, 2007:200) Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan wawancara dengan istilah tim atau panel. Selain mempersiapkan instrumen sebagai pedoman wawancara, peneliti dalam wawancara ini dalam mempersiapkan dan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan dengan lancar. Sehingga nantinya dapat membantu peneliti dalam memperoleh sumber data utama dari penelitian yang dilakukan, yakni terkait dengan proteksi pemerintah desa terhadap eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat, aturan, keputusan, ataupun dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, teknik dokumentasi juga dapat berfungsi untuk menelusuri data data historis lalu, yang juga dapat mendukung penelitian ini. Sehingga nantinya, teknik dokumentasi ini dapat mendukung peneliti dalam

mengkroscek atau mengecek ulang data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif. Arikunto (2006:7) menjelaskan bahwa "penelitian eskploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu".

Selanjutnya dalam analisis data penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan analisis dalam model Miles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Sehingga melalui reduksi data akan mendapatkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.(Miles dan Huberman dalam Prastowo, 2012:242-243).

b. Triangulasi Data

Triangulasi data yaitu membandingkan data hasil penelitian dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan oleh orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan perkataan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu membandingkan

keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat dan atau pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan rendah, menengah dan tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

c. Penyajian Data (*Display*)

Data yang telah terkumpul kemudian dipaparkan apa adanya. Dalam hal ini semua data yang dianggap penting berupa teks normatif, gambar maupun tabel disajikan apa adanya.

d. Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahap akhir dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini hasil temuan dan pemberian makna oleh peneliti dikaitkan dengan konseptual yang ada sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara. Hal ini akan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis dengan menggunakan data tersebut.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGLINDUR DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

A. Sejarah Kalurahan Nglindur

Kalurahan Nglindur adalah salah satu Kalurahan yang ada di Kapanewon Girisubo. Berdasarkan kronologi historis pemerintahan, Kalurahan Nglindur berdiri atau mulai tersusun bentuk pemerintahan mulai tahun 1929. Hal ini dilihat dari suksesi kepemimpinan di Kalurahan Nglindur sebagai berikut:

1. Sebelum tahun 1925 Masehi belum dikenal pemerintahan setingkat Kapanewon, pada saat itu baru berupa Kademangan yang dipimpin oleh Demang. Demang membawahi Bekel, sedangkan di bawah Bekel ada sub pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang Congkok. Dengan demikian bentuk pemerintahan saat itu masih sangat sederhana. Sehingga komunitas masyarakat Nglindur saat itu sudah terbentuk yang dipimpin oleh seorang Bekek, namun belum mengenal sistem pemerintahan.
2. Pada tahun 1926 Masehi baru terbentuk Kemantren yang dipimpin oleh Mantri Pangreh Proudjo yang berkedudukan di Jerukwudel. Kemantren ini setingkat dengan Kapanewon sekarang, saat itu dijabat oleh Rng. Hardjowidarso.
3. Pada tahun 1929 Kemantren di Jerukwudel berubah menjadi Order Distrik (masa Belanda) yang berada di bawah Kawedanan. Pejabat Order Distrik Rongkop berkedudukan di Jerukwudel dengan kantor samping pasar Rancah. Pimpinan Order Distrik disebut Asisten Wedodo. Asisten Wedodo yang memerintah pertama kali di wilayah Order Distrik Rongkopyang berada di Jerukwudel bernama Rng. Harjodikoro. Secara berturut-turut sebelum ibukota Order Distrik pindah ke Baran, Semungih Asisten Wedodo yang memerintah dengan ibukota di Jerukwudel adalah: Rng.

Hardjodipoerwo, Rng. Hardjo Pandroyo dan Rng. Hardjo Sumantri, baru kira-kira pada tahun 1940-an ibukota pindah ke Semungih.

4. Bersamaan dengan dibentuknya Order Distrik sebagai pengganti Kemantren, di Nglindur dibentuk pemerintahan di bawah Kemantren dengan nama Kalurahan Nglindur yang diperintah oleh seorang Lurah Kalurahan yang dibantu oleh Pamong Kalurahan dengan nama Carik, Kamituwo Bayan, Jogomirudo, Jogoboyo, Moden serta para Antek (Antek: pembantu Pamong Kalurahan dan di luar struktur pemerintahan).
5. Dari kronologi terbentuknya pemerintahan Nglindur, dapat dikatakan bahwa Kalurahan Nglindur memulai pemerintahan Kalurahan sejak tahun 1915, sehingga sebelum tahun 1915 komunitas masyarakat dipimpin oleh seorang Bekel. Selanjutnya kepemimpinan di Kalurahan Nglindur berturut-turut sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan tahun 1915 dipimpin Bekel. Belum bisa diketahui Bekel yang memimpin saat itu dan sejak kapan komunitas masyarakat Nglindur dipimpin Bekel belum dapat diketahui secara jelas
 - b. Tahun 1915 – 1926 dijabat oleh Lurah Kalurahan Kerto Semito
 - c. Tahun 1927 – 1946 diganti oleh Lurah Kromo Wijoyo
 - d. Tahun 1946 – 1956 dipimpin oleh Lurah HS Suparno
 - e. Tahun 1956 – 1965 dipimpin oleh Lurah Parto Wijoyo
 - f. Tahun 1966 – 1985 dipimpin oleh Lurah Karso Pawiro
 - g. Tahun 1985 – 2004 dipimpin oleh Lurah Edy Warsito
 - h. Tahun 2004 – 2014 dipimpin oleh Lurah Sujana
 - i. Tahun 2014 – bulan Juni 2015 dipimpin oleh Penjabat Lurah Suprapta
 - j. Bulan Juni 2015 – Desember 2015 dipimpin oleh Pejabat Lurah Suharyanto
 - k. Tahun 2016 – 2022 dipimpin oleh Lurah Supriyana.

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Nglindur merupakan salah satu Kalurahan dari 144 Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Nglindur terletak di Kapanewon Girisubo, tepatnya di sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak dari pusat Ibukota Kabupaten Gunungkidul sejauh 32 km. Luas wilayah Kalurahan Nglindur 617.5630 Ha.

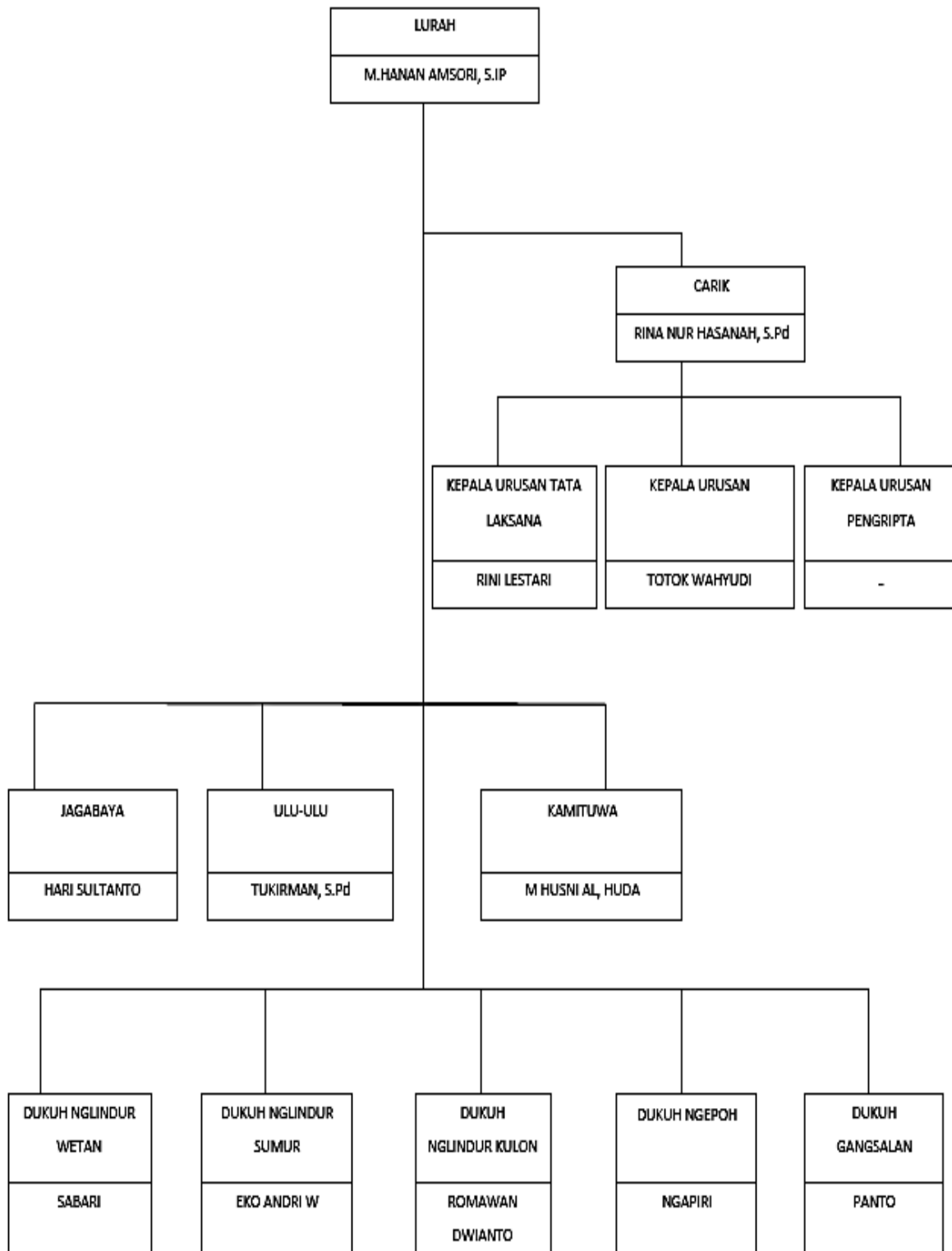
Secara administratif Kalurahan Nglindur, batas wilayah Kalurahan Nglindur yaitu:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Bohol Rongkop Gunungkidul
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tileng Girisubo Gunungkidul
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Melika Rongkop Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul
4. Sebelah Utara Semugih Rongkop berbatasan dengan Kapanewon Gunungkidul

Sedangkan orbitasi (jarak dari pusat pemerintah) seperti yang sudah tercantum dalam data monografi Kalurahan Nglindur menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon 6,5 Km
2. Jarak dari Pusat Pemerintah Kota/Ibukota Kabupaten 40 Km
3. Jarak dari Pusat Pemerintah Ibukota Provinsi 80 Km

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Data Observasi Tahun 2023

Keterangan :

- Lurah (Kepala Desa)
- Carik (Sekertaris Desa)
- Danarta (Kaur Keuangan)
- Tata Laksanaan (TU)
- Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan)
- Jagabaya (Kasie Pemerintah)
- Ulu-Ulu (Kasie Kesejahteraan)
- Kamituwa (Kasie Pelayanan)

Dari gambar 2.1 di atas menggambarkan tentang struktur organisasi Kalurahan Nglindur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 Tahun 2020 tentang Pemerintah Kalurahan. Kalurahan adalah desa diwilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untk mengatur dan mengurus urusan pemerintah.

C. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data mengenai jumlah kependudukan di Kalurahan Nglindur tercatat yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.181 orang dan perempuan 2.187 orang sehingga jumlah keseluruhan masyarakat Kalurahan Nglindur berjumlah 4.368 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kalurahan Nglindur masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan, meskipun tidak begitu jauh jarak jumlahnya. Berikut merupakan rincian tabel berdasarkan jumlah penduduk.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Penduduk Kalurahan Nglindur dengan jumlah usia terbanyak 26 – 40 tahun yang berjumlah 943 orang dan jumlahnya paling sedikit berjumlah 47 yaitu usia >75 tahun. Dimana Kalurahan Nglindur memiliki banyak orang dewasa, terutama orang tua kalangan perempuan berjumlah 490 orang dan laki-laki 453 orang. Kemudian untuk yang berusia 75 tahun paling sedikit laki-laki mendominasi berjumlah 26 orang dan perempuan 21 orang. Berikut merupakan rincian tabel berdasarkan golongan usia:

Table 2. 1 Daftar Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Berdasarkan (Tahun)	Laki-Laki (Jiwa)	Persentase (%)	Perempuan (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)
0 – 6	125	5,73	119	5,44	244
7 – 12	108	4,95	144	6,58	252
13 – 18	178	8,16	189	8,64	367
19 – 25	181	20,70	211	9,65	392
26 – 40	453	8,58	490	22,41	943
41 – 55	479	21,96	451	20,62	930
56 – 65	312	14,30	276	12,62	588
65 – 75	319	14,62	286	13,08	605
>75	26	1,19	21	0,96	47
Jumlah	2.181	100.00	2.187	100.00	4.368

Sumber: Profil Kalurahan Nglindur Tahun 2022

Dari tabel di atas tampak bahwa kelompok usia 26–40 tahun merupakan jumlah penduduk berdasarkan usia dengan jumlah paling banyak. Untuk jumlah penduduk berdasarkan usia dengan jumlah paling sedikit atau rendah adalah kelompok usia >75 tahun. Adapun anggota dari kelompok pengolah keripik singkong di Kalurahan Nglindur di dominasi oleh kelompok usia 41- 55 tahun. Hal ini dikarenakan mereka

masih masuk di dalam pengelompokan usia produktif serta masih mampu dalam melakukan pengolahan kripik singkong.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Di Kalurahan Nglindur berprofesi sebagai petani, dimana didominasi oleh laki-laki 800 orang dan disusul oleh perempuan berjumlah 200 orang. Kemudian pekerjaan sebagai perangkat kalurahan didominasi oleh laki-laki 28 orang dan perempuan 4 orang, memperlihatkan minimnya peran perempuan dalam keterlibatan menjadi Pamong Kalurahan.

Table 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Petani	800	200	1.000
Buruh Tani	80	80	160
Ibu Rumah Tangga	0	640	640
Perangkat Desa	28	4	32
Buruh Harian Lepas	480	230	710
Nelayan	-	-	-
Kelompok Pengolah Kripik Singkong	-	-	-
Jumlah	1.388	1.154	2.542

Sumber: Profil Kalurahan Nglindur 2022

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan yang paling dominan adalah tamatan SMA/ sederajat yang berjumlah 573 orang, yang terdiri dari 256 orang laki-laki dan 317 perempuan. Kemudian yang paling sedikit adalah lulusan Serjana (S-1) yakni berjumlah 10 orang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sehingga

dapat disimpulkan secara tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat telah menyelesaikan diri dari wajib pendidikan wajib belajar.

Table 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Sekolah	Laki-laki (orang)	Persentase (%)	Perempuan (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)
1	SD	252	21,22	211	18,91	463
2	SMP	394	33,17	381	34,14	775
3	SMA	537	45,20	519	46,50	1.056
4	Perguruan Tinggi	5	0,42	5	0,45	10
Jumlah		1.188	100.00	1.116	100.00	2.304

Sumber: Profil Kalurahan Nglindur Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling mendominasi adalah tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 1.056 orang penduduk. Minimnya penduduk Kalurahan Nglindur yang melanjutkan pendidikan sampai S-1, menyebabkan tingkat pendidikan S-1 hanya 10 orang saja. Sedangkan untuk pendidikan S-2 belum ada satu pun yang sudah menempuh pendidikan S-2. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Nglindur mayoritas berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pekerjaannya dimana mayoritas dari kelompok pengolah Kripik Singkong, Jahe Instan adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA. hal ini tentunya sangat berpengaruh pada pengalaman, wawasan dan tingkat pengetahuan masyarakat serta mental yang kuat terutama pada kelompok pengolah Keripik Mingkong yang dimana mereka masih kesulitan di dalam melakukan pemasaran, pengemasan (*Packing*) dan di dalam pengolahan Jahe Instan.

D. Sosial Ekonomi

Adapaun gambaran dan sosial ekonomi Kalurahan Nglindur yang di dalamnya terdapat kelembagaan serta beberapa usaha ekonomi yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Lembaga Ekonomi atau Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) terdiri atas 1 (satu), dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) dan memiliki kepengurusan inti 6 (enam) orang.
2. Jasa Lembaga Keuangan terdiri atas Industri Kecil dan Menengah seperti industri makanan berjumlah 8 unit, dengan anggota kepengurusan sebanyak 35 orang.
3. Usaha Jasa dan Perdagangan yang terdiri atas usaha toko/kios sebanyak 6 unit, dengan jenis produk yang diperdagangkan (umum, sayur, barang dan jasa tambang dan lain-lain) dengan menyerap 9 orang tenaga kerja. Toko Kelontong sebanyak 75 unit yang menyerap 17 orang tenaga kerja.
4. Usaha Jasa gas, listrik, BBM dan air yang mana berupa usaha penyewaan tenaga listrik sebanyak 1 unit, pengeceran gas dan bahan bakar 57 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 60 tenaga kerja.
5. Usaha Jasa Keterampilan yang terdiri dari Tukang kayu 115 unit, tukang batu 134 unit, tukang jahit/bordir 16 unit, tukang cukur 1 unit, tukang service elektronik 5 unit, dan tukang pijat/pengobatan 16 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 287 orang.

E. Sarana dan Prasana

Secara umum Kalurahan Nglindur telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana seperti yang dapat kami jelaskan dibawah ini :

1. Prasarana transportasi darat yakni 1,5 panjang konblok/semen/beton yang sejauh ini sudah cukup baik sepanjang 13.200 Km serta sarana transportasi darat 1 unit. Selain itu adanya sungai dengan kondisi cukup baik.
2. Prasarana komunikasi yang terdiri atas telepon 37.654 pelanggan GSM, tersedia TV umum berjumlah 13 unit, radio 782 unit dan parabola 563 unit.
3. Tersedia sarana air bersih dan sanitasi di beberapa padukuhan yang terdiri dari sumur galian 9 unit dan PAH 1.267 unit. Sanitasi sumur resapan air rumah tangga sebanyak 4.301 rumah dan hampir semua memiliki jamban pembuangan yang layak.
4. Meskipun daerah yang mayoritas kegiatan masyarakat petani, namun hingga saat ini belum memiliki irigasi pengairan.
5. Sarana dan prasarana pemerintahan seperti kantor kalurahan sudah ada, namun untuk balai kalurahan sendiri masih menggunakan jogyo pribadi milik lurah.
6. Adanya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan seperti kantor dan peralatannya, serta inventaris lainnya. Dalam hal ini lembaga-lembaga tersebut ialah Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Forum Kader Pemberdayaan Masyarakat, UMKM dan lembaga lainnya, meski demikian belum semua memadai.
7. Sarana dan prasarana kesehatan dengan adanya balai pengobatan, posyandu, praktek bidang maupun dokter dan rumah bersalin.
8. Terdapat sarana energi dan penerangan listrik PLN di setiap rumah berjumlah 1.223 lokasi.

9. Sarana dan prasarana rumah produksi khusus dari pemerintah desa untuk pembuatan abon ikan tuna bagi kelompok abon masih menggunakan rumah ketua pembuatan abon ikan tuna.
10. Sarana dan prasarana untuk tempat pemasaran produk khusus abon ikan tuna sudah disediakan oleh pemerintah desa dengan jumlah 1 kios namun apabila ingin menggunakan kios tersebut maka kelompok pengolah abon ikan tuna harus menyewa tempat tersebut agar bisa dapat digunakan.
11. Sarana dan prasarana untuk alat angkut ikan dalam jumlah besar seperti truk dan box penyimpanan ikan segar, nelayan dan kelompok pengolah abon ikan tuna sudah memiliki dan apabila ingin membeli ikan tuna dalam keadaan mendadak maka dapat dengan mudah didapatkan karena disetiap padukuhan pasti ada nelayan-nelayan yang menjual ikan di rumahnya baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit.

F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi periode perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pada akhir jangka menengah yakni 6 (enam) tahun. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan periode 2021-2027, merupakan penjabaran visi lurah terpilih, visi tersebut menjawab permasalahan dan isu strategis kalurahan sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kalurahan Nglindur, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2021-2027 adalah: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan guna mewujudkan masyarakat Kalurahan Nglindur yang bertakwa, berbudaya, bermartabat, dan sejahtera.

Visi diatas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh pemerintah Kalurahan Nglindur pada tahun 2021-2027, yaitu: Terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka terhadap saran dan masukan, jujur dalam setiap tindakan dan adil bagi semua golongan masyarakat. Selalu mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan, melakukan pelayanan publik yang cepat prosesnya, mudah syarat-syaratnya serta tepat sarannya. Selalu meningkatkan profesionalisme bagi seluruh pamong dan perangkatnya. Mengembangkan sistem usaha mandiri melalui pemerdayaan UMKM. Serta dengan menggalang silaturahmi antar dan inter golongan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalurahan. Visi kalurahan Nglindur diselaraskan dengan visi daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu: “Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera Tahun 2025”. Interkoneksi visi Kalurahan Nglindur seperti pada bagian sebagai berikut:

Keterkaitan Visi Kabupaten dan Misi Kalurahan Nglindur:

Visi Kalurahan Nglindur “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan guna mewujudkan masyarakat Kalurahan Nglindur yang Bertakwa, Berbudaya, Bermartabat dan Sejahtera. Selaras dengan visi dan arah pembangunan Lima Tahun Keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan membantu menguraikan upaya-upaya strategi yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk

memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi kalurahan.

Upaya-upaya tersebut sebagai berikut :

Misi 1 :	Mengoptimalkan Pemerintah yang Bersih dan Transparan.
Tujuan :	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintah Kalurahan.
Sasaran :	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat, masyarakat, Pemerintah Kalurahan, lembaga Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
Misi 2 :	Meningkatkan Kerukunan Inter dan Anter Umum Beragama.
Tujuan :	Menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.
Sasaran :	Seluruh warga dan kalurahan.
Misi 3 :	Menggali potensi SDM yang berbudaya.
Tujuan :	Mengembangkan kualitas individu dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
Sasaran :	Tidak ada lagi anak putus sekolah, tumbuhnya kelompok keterampilan baru, Tersediannya TTG pertanian dan peternakan.
Misi 4 :	Meningkatkan Kebutuhan Dasar Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan, Ekonomi, Pertanian dan Kesehatan.
Tujuan :	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi, Pendidikan Ekonomi, Pertanian, Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana.
Sasaran :	Tersediannya Pos Layanan Teknologi Tepat Guna, Partisipasi Sosial.

a. Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat adalah suatu jenis lembaga yang mengatur segala rangkaian tata cara dan instruksi dalam melakukan suatu hubungan antara manusia saat sedang menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keadaan teratur hidup. Lembaga masyarakat yang ada di Kalurahan Nglindur adalah sebagai berikut :

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)
- 2) Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal)
- 3) Program Kesejahteraan Kalurahan (PKK)
- 4) Posyandu
- 5) Linmas
- 6) Rukun Tetangga (RT)
- 7) Rukun Warga (RW)
- 8) Karang Taruna
- 9) Kelompok Tani
- 10) Organisasi Keagamaan
- 11) Organisasi Kelompok-Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Setiap lembaga-lembaga sosial yang ada di Kalurahan Nglindur tercipta sesuai dengan fungsinya masing-masing lembaga dan menjadi sebuah wadah bagi masyarakat yang ada yang mempunyai kemampuan, kreativitas sesuai dengan bidang-bidang yang ada.

Hadirnya lembaga sosial di desa menjadi wadah bagi masyarakat kalurahan yang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan di masing-masing lembaga yang tersedia di Kalurahan Nglindur. Peran suatu lembaga sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan suatu pembangunan di Kalurahan. Dengan adanya lembaga sosial di masyarakat, harapannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Hubungannya dengan penelitian ini adalah, dengan adanya suatu lembaga yang bergerak di bidang pemanfaatan ekonomi lokal ini yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu mendobrak perekonomian masyarakat Kalurahan Nglindur untuk lebih maju dan atau dapat membantu meningkatkan

perekonomian masyarakat serta membantu kesejahteraan masyarakat Kalurahan Nglindur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya campur tangan Pemerintah Kalurahan yakni dalam bidang pemberdayaan masyarakat, mampu memberdayakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini agar kapasitas yang dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut mampu untuk menggerakkan roda organisasi untuk dapat maju dan berkembang serta mewujudkan cita-cita bersama yakni kesejahteraan masyarakat. Disini Kapasitas Pemerintah Desa sangat dibutuhkan guna untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk maju, berkembang dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Nglindur.

b. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sumber kehidupan perekonomian masyarakat nasional maupun daerah. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah khususnya di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul saat ini sudah mulai aktif dan sudah terbentuknya kelompok-kelompok dari 8 (delapan) padukuhan yang ada di Kalurahan Nglindur. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini masih mengalami kesulitan yaitu kurangnya peningkatan hasil produksi dan proses pemasaran dan masih sangat sulit mencari peluang untuk menjual produk-produk UMKM, serta belum adanya pemasaran, pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan itu sendiri.

Pemerintah Kalurahan juga sedang berusaha memproses untuk membantu mendapatkan PIRT dan Label Halal, pemerintah kalurahan juga telah mengaudensikan ke Dinas Koperasi UMKM yang ada di Kabupaten Gunungkidul, dikarenakan dari 8 (delapan) kelompok UMKM tersebut hanya satu kelompok

UMKM yang telah mendapatkan PIRT dan Label Halal yakni Kelompok UPPKA Dawis04 dengan produk olahannya yaitu minuman instan jahe emperik. Pemerintah kalurahan juga telah bekerjasama dalam memberikan kebijakan atau program pemberdayaan dengan mendapatkan bantuan dana lewat program Forum Keresasian Sosial (FKS) dari Kementrian Sosial dan hal itu diperuntukan untuk fisik sarana pemberdayaan yakni pengadaan alat-alat produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hubungannya dengan penelitian ini adalah, dengan adanya suatu lembaga yang bergerak di bidang pemanfaatan ekonomi lokal ini yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu mendobrak perekonomian masyarakat Kalurahan Nglindur untuk lebih maju dan atau dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta membantu kesejahteraan masyarakat Kalurahan Nglindur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya campur tangan Pemerintah Kalurahan yakni dalam bidang pemberdayaan masyarakat, mampu memberdayakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini agar kapasitas yang dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut mampu untuk menggerakan roda organisasi untuk dapat maju dan berkembang serta mewujudkan cita-cita bersama yakni kesejahteraan masyarakat. Disini Kapasitas Pemerintah Desa sangat dibutuhkan guna untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk maju, berkembang dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Nglindur.

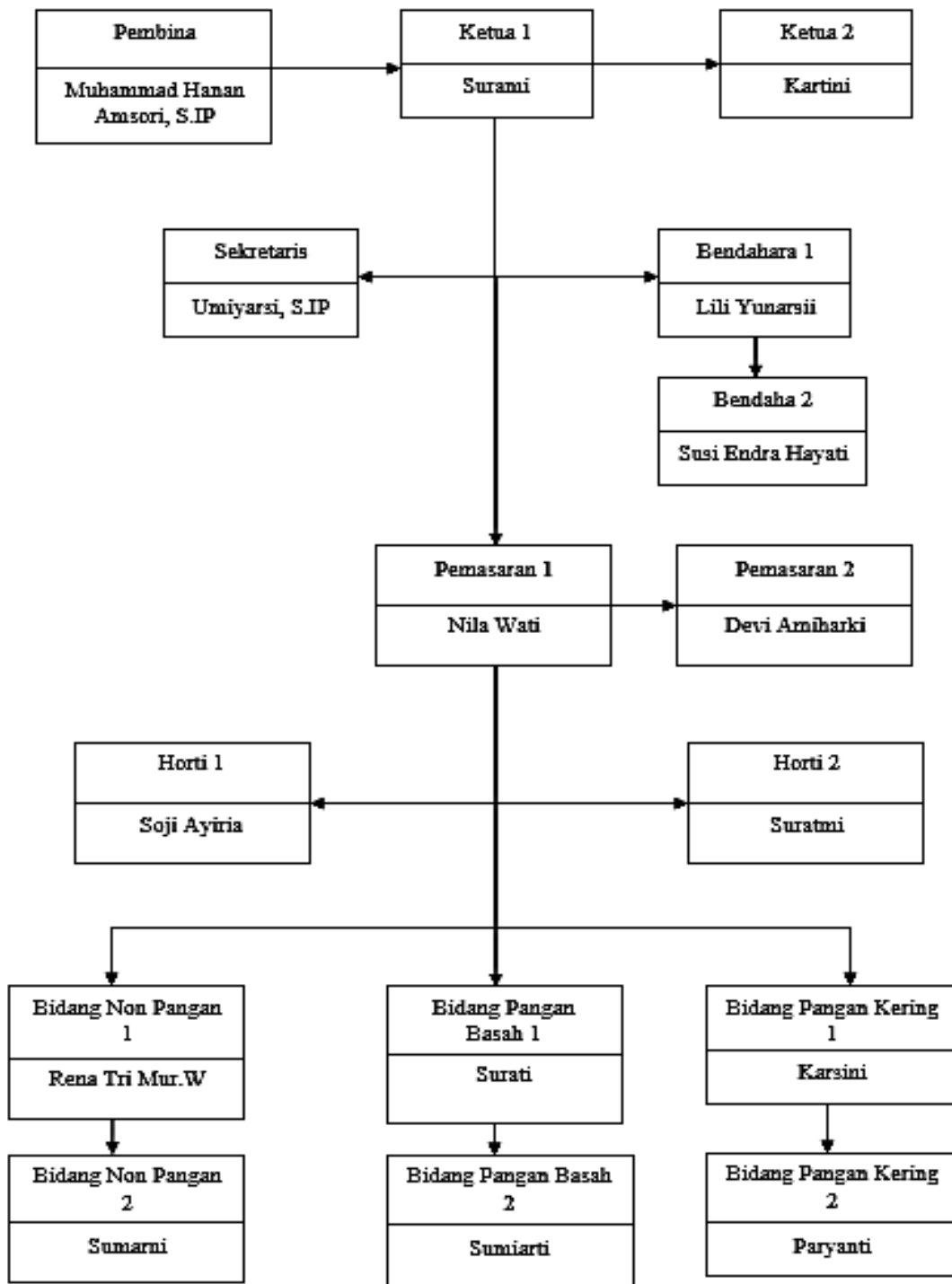
Table 2. 4 Data Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

No	Nama Padukuhan	Nama Kelompok	Jenis-Jenis Produk	Jumlah Anggota
1	Nglindur Wetan	UPPKA Dawis04	Olahan Minuman Instan Jahe Emperik	17 orang
2	Ngepoh	Lestari Budaya	Stick Pisang	10 orang
3	Nglindur Kulon	Sami Roaso	Jenang	8 orang
4	Sumur	Maju Berkah	Enting-Enting Jahe	5 orang
5	Gangsalan Kidul	Guyub	Krecek Telo	10 orang
6	Gangsalan Lor	Sari Rejeki	Wingko Babat	10 orang
7	Wuni	Mekar Sanck	Kripik Talas	7 orang
8	Tekik	Srikandi Snack	Kacang Oven	37 orang

Sumber : Data Observasi Tahun 2023

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Kalurahan Nglindur



Sumber : Data Observasi Tahun 2023

BAB III

ANALISIS PROTEKSI PEMERINTAH DESA TERHADAP EKSISTENSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN NGLINDUR, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan proteksi pemerintah desa terhadap eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap informasi yang dimuat merupakan hasil yang diperoleh dari informan melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi dari setiap objek penelitian yang akan dianalisis dengan jenis penelitian kualitatif eksploratif. Temuan-temuan informasi dan jawaban dari responden yang didapat oleh peneliti akan dituangkan di dalam bab ini dalam bentuk tulisan yang ilmiah dan mudah untuk dimengerti serta dipahami oleh pembaca.

Terkait dengan pembahasan yang mengacu pada fokus penelitian yang peneliti gunakan maka akan dibagi dalam 2 topik yang akan di bahas dalam bab ini sebagai berikut:

A. Proteksi pemerintah desa terhadap keberadaan UMKM di Kalurahan Nglindur:

Salah satu makna pemerintah desa adalah proteksi. Proteksi artinya melindungi dan membuka akses bagi orang-perorangan atau rakyat untuk mengakses seperti akses modal, meraih kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperoleh informasi, kesempatan untuk berusaha, kesempatan mengakses sumber daya alam, dan sebagainya. Tujuan ialah untuk melindungi rakyat jelata dari sekelompok kecil elit (baik ekonomi maupun politik) (Sutoro Eko 24 Oktober 2020).

Governing membahas mengenai mengatur dan mengurus yang diambil dari tradisi Belanda, mengatur berarti membuat keputusan terutama membuat hukum (*low making*),

mengurus (*bestuur*), dan pengelola. Jadi makna mengatur dan mengurus itu adalah perbuatan hukum dan pembuatan administrasi dan agak mengabaikan perbuatan politik. Konsep ini menjalankan beberapa fungsi yaitu mengarahkan (*streering*), menata (*ordering*), memerintah (*governing*), dan menguasai (*rulling*).

Pemerintah kalurahan Nglindur dalam mewujudkan proteksi terhadap UMKM pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, seperti yang sejalan dengan yang disampaikan Lurah Kalurahan Nglindur M.Hanan Amsori, S.IP :

“Di tahun 2022 kita berikan bantuan karena memang kita kalau mengandalkan fokus di sumber dana yang sumber dana desa itu terbatas juga yang harus dibiayai juga banyak sekali macamnya dari dana desa itu kita berupaya untuk meraih sumber dana yang lain khusus untuk memberdayakan UMKM, Kemarin kita dapat pendanaan dari kementerian sosial, dengan pengajuan proposal dan Alhamdulillah di realisasikan itu sebesar Rp.30.000.000 untuk pemberdayaan UMKM kemarin kita mereka butuh alat produksi yaudah kita belikan alat produksi dengan sesuai kebutuhan mereka karena kan yang diproduksi beda-beda. Bagaimana mengupayakan UMKM itu berkembang untuk istilahnya kita pemerintah kalurahan itu tidak cukup berhenti di istilahnya untuk memberdayakan bagaimana untuk memproduksi tapi kita juga berfikir bagaimana setelah produksi itu pemasarannya seperti apa dan saya sudah berupaya jauh seperti itu” (Rabu, 23 Agustus 2023).

Dari kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Lurah, tersebut menunjukkan bahwa, pada tahun 2022 adanya diberikan bantuan khususnya untuk pemberdayaan UMKM. Sejak itu Pemerintah Kalurahan mengupayakan adanya pemberdayaan khusus untuk UMKM namun karena dana yang terbatas maka belum ada perencanaan program terkait pemberdayaan UMKM. Kita tahu bahwa fungsi atau makna pemerintah adalah proteksi. Proteksi itu sendiri artinya melindungi dan membuka akses bagi orang-perorangan atau rakyat untuk mengakses seperti akses modal, meraih kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperoleh informasi, kesempatan untuk mengakses sumber daya alam dan sebagainya yang artinya bahwa, pemerintah tidak hanya menunggu laporan dari pihak UMKM baru bertidak melainkan pemerintah kalurahan harus mampu melindungi sesuai makna pemerintah yakni prokteksi. Selanjutnya hal serupa juga

disampaikan oleh Rina Nur Hasanah, S.Pd selaku carik. Kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Langkah konkret itu 2022 kemarin itu kita mengusulkan program melalui forum keserasian sosial itu programnya dari Kementerian Sosial, nah kemudian itu kita mengajukan dari yang kita ajukan itu sudah dapat realisasi kebetulan melalui program itu ada dua kegiatan yaitu pipanisasi dan yang satu penguatan UMKM itu sebesar Rp.200.000.000 untuk dua kegiatan tersebut dan sudah terealisasi., Rp. 200.000.000 ya untuk dua kegiatan” (Rabu, 23 Agustus 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat di ketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Nglindur telah melakukan usulan program kepada Kementerian Sosial dan dalam usulan tersebut terdapat dua program kegiatan yakni pipanisasi dan juga UMKM. Dari Kementerian Sosial memerikan bantuan dana sebesar Rp 200.000.000 kepada pihak kalurahan melalui Forum Keserasian Sosial (FKS) dan dari dana tersebut untuk porsi UMKM-nya mendapat bantuan dana sebesar Rp 30.000.000 dan sisa dananya untuk menopang kegiatan dari program pipanisasi. Dari sini diketahui bahwa pemerintah kalurahan telah melakukan usaha untuk melindungi dan juga mengembangkan UMKM melalui penyampaian usulan kepada Kementerian Sosial. Selanjutnya hal serupa juga di sampaikan oleh Pak Totok Wahyudi selaku Danarta. Kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk melindungi di pemerintah kalurahan Nglindur atau desa Nglindur itu mengupayakan , memfasilitasi ijin P-IRT dan juga Label Halal itu pemerintah kalurahan Nglidur memfasilitasi untuk semua UMKM mendapatkan itu dan untuk mendukung, dari Pemerintah Kalurahan Nglindur itu hampir setiap tahun itu ada Namanya pemberdayaan Masyarakat itu ada dana dari dana desa untuk kelompok PKK atau UMKM untuk membuat produk, alat-alat untuk membuat produk dari masing-masing kelompok UMKM itu” (Rabu, 23 Agustus 2023).

Berdasarka kutipan wawancara bersama Pak Totok Wahyudi diatas, diketahui bahwa dari pemerintah kalurahan sendiri telah memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan atau memperoleh ijin P-IRT dan juga Label Halal, tidak hanya itu saja, pemerintah kalurahan juga telah mengalokasikan anggaran sebagai penunjang untuk membantu para pelaku UMKM dalam memproduksi produk UMKM. Kita ketahui bahwa pemerintah

kalurahan merupakan salah satu aktor penting dalam mendukung dalam hal melindungi UMKM agar tetap eksis dan berkembang di berbagai situasi dan kondisi, apalagi berbicara tentang UMKM itu sendiri, apabila tidak pintar dalam melakukan teknik marketing yang baik maka produk akan sangat sepi untuk di minati oleh para konsumen apalagi persaingan UMKM di pasar hari ini semakin memanas karena UMKM merupakan salah satu apek dalam menunjang kebutuhan pokok dan pembangunan pendapatan masyarakat. Selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Drs. Sugeng Wibowo, M.Pd.I selaku ketua BPD. Kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Kalo yang khusus dari pemerintah secara identik memang belum, tetapi secara tersirat memang memberikan motivasi kepada seluruh UMKM untuk inovasi untuk menggunakan media sosial untuk promosi menggunakan jasa online dan sebagainya” (Sabtu, 26 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Sugeng di atas, dapat diketahui bahwa, pemerintah kalurahan belum mengeluarkan program khusus untuk melindungi dan juga mendukung keberlanjutan atau dalam pengembangan UMKM. Namun pemerintah kalurahan tidak hanya diam saja melainkan pemerintah kalurahan juga memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM terkait bagaimana upaya untuk mengembangkan produknya dan juga pemerintah membantu mempromosikan hasil produksi UMKM melalui sosial media sebagai bentuk untuk memperkenalkan hasil produksi UMKM kepada masyarakat luas (konsumen). Selanjutnya hal serupahnya juga disampaikan oleh ketua UMKM Ibu Surami. Kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Untuk pemerintah Kalurahan itu benar-benar sangat membantu, dalam hal ini baik mengupayakan bagaimana kelompok UMKM itu bisa berjalan dan tentang bahan bakunya itu pemerintah kalurahan juga ikut, jadi tidak diserahkan apa keperluan kelompok itu bukan kelompok saja yang ini Ketika kelompok butuh ini juga pemerintah bisa membantu mengupayakan entah nanti di carikan bantuan entah nanti di istilahnya pelaku usaha dan petani itu bagaimana cara kerjasamanya jadi pemerintah mengupayakan itu jadikan misalkan kita UMKM perlu jahe, ya pemerintah mendorong sih petani jahe bagaimana cara menanam jahe agar bisa mencukupi UMKM itu misalkan yang dari ketela olahan ketela bagaimana petani ketela ini bisa mencukupi kebutuhan UMKM yang bahan bakunya ketela gitu jadi pemerintah sangat sudah mulai bisa memfasilitasi, sudah bisa membantu perannya sudah mulai banyak” (Rabu, 23 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara bersama ibu Surami selaku ketua UMKM tingkat Kalurahan, dapat di ketahui bahwa pemerintah kalurahan telah melakukan tugas serta fungsinya sebagai pemerintah yakni melindungi UMKM agar tetap maju dan berkembang. Pemerintah Kalurahan telah melakukan pendekatan atau kerja sama dengan para petani untuk membantu memsubsidi bahan baku untuk menunjang keberlangsungan produksi seperti menyediakan jahe untuk membantu para pelaku usaha Jahe Instan untuk melakukan produksi Jahe Instan. Hal ini sangat membantu para pelaku usaha untuk mencari bahan baku karena telah melakukan kerja sama dengan para petani untuk membantu menyediakan jahe lalu di ambil oleh para pelaku dan selanjutnya di produksi. Makna pemerintah yakni proteksi menjelaskan terkait upaya untuk melindungi dan juga membuka akses baik akses modal dan juga akses untuk mendapatkan sumber daya alam telah dijalankan dan di realisaikan melalui upaya untuk bekerja sama dengan para petani untuk menyediakan bahan baku Jahe untuk mendukung para pelaku usaha dalam memproduksi hasil produksinya. Selanjutnya wawancara bersama Ibu Karsini selaku ketua dua (2) usaha Jahe Emperit. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk pemerintah setempat itu selalu memberi tempat, selalu memberi kesempatan untuk kita selalu istilahnya mengembangkan UMKM yang kami Kelola ataupun yang kelompok punya ataupun yang di Kelola kelompok itu selalu apa istilahnya di beri inilah diberi fasilitas diberi peluang di beri apa Namanya kesempatan untuk misalnya ada *event-event* apa gitu, itu selalu pemerintah setempat selalu memberi peluang, selalu mendukung” (Sabtu 26, Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Karsini selaku ketua dua (2) usaha Jahe Emperit. Berdasarkan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pemerintah kalurahan selalu memberi ruang kepada para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan produksinya masing-masing, pemerintah kalurahan juga selalu mendukung para pelaku usaha dengan memberi kesempatan kepada para pelaku, tidak hanya sampai disitu saja, pemerintah kalurahan juga membuka akses atau memberikan akses kepada para pelaku usaha untuk

ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan atau event-event untuk mempromosikan hasil produksinya kepada masyarakat luas (konsumen). Disini jelas bahwa, pemerintah kalurahan telah membuka atau memberi akses kepada para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk belajar yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan terkait bagaimana berusaha baik dalam manajemen pengelolaan dan juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan hasil produksi sekaligus memperkenalkan wajah kemandirian masyarakat Kalurahan Nglindur melalui wajah UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan yang menurut peneliti sangat relevan dengan apa yang hendak peneliti cari. Hasil wawancara yang telah peneliti paparkan di atas jelas bahwa, pemerintah kalurahan telah berupaya untuk melindungi dan mengembangkan UMKM melalui usulan program yang disampaikan kepada Kementerian Sosial melalui Forum Keserasian Sosial (FKS) yakni program khusus untuk UMKM dan juga program untuk pibanisasi. Dana dari Kementerian Sosial sebesar Rp 200.000.000 diberikan kepada Forum Keserasian Sosial. Dari dana tersebut, porsi atau bagian khusus untuk UMKM sebesar Rp 30.000.000 dan sisa dana lainnya dialihkan ke program kegiatan pibanisasi. Selain usulan program yang diberikan kepada Kementerian Sosial melalui Forum Keserasian Sosial (FKS), pemerintah kalurahan juga melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan para petani dan pelaku UMKM untuk menyediakan bahan baku sebagai penunjang keberlangsungan aktifitas produksi UMKM. Di sini jelas bahwa makna pemerintah yakni proteksi benar-benar direalisasikan dengan berbagai cara baik membuka akses untuk mendapatkan informasi, kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk mengakses sumber daya alam, kesempatan untuk akses modal. Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk memberikan kesempatan untuk belajar,

kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan atau event-event yang diselenggarakan baik ditingkat kalurahan maupun diluar kalurahan.

B. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Proteksi Pemerintah Desa Terhadap Eksistensi UMKM Di Kalurahan Nglindur.

Berdasarkan hasil beberapa review jurnal yang peneliti gunakan dalam skripsi ini menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya potensi atau daya yang dimiliki untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa sangatlah penting. Dalam fokus penelitian ini peneliti akan membahas tentang faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat proteksi pemerintah desa terhadap eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur. Pertama faktor-faktor yang mendukung proteksi pemerintah desa menurut beberapa informan sebagai berikut.

Penjelasan terkait faktor-faktor yang mendukung proteksi pemerintah desa oleh Pak M.Hanan Amsori, S.IP selaku Lurah Kalurahan Nglindur :

“ ya tentu kelompok UMKM itu juga perlu dukungan artinya dari berbagai pihak terutama pemerintah kalurahan yang dalam hal ini memiliki warga atau Masyarakat yang istilahnya melakukan aktivitas produksi yaitu merupakan masuk kategori UMKM itu juga kita berartinya bisa dikatakan berkolaborasi kita mengintervensi kaitan dengan pendanaan dengan pemberdayaan kemudian ya singkat kata mengalokasi pemerintah kalurahan itu bagaimana UMKM itu bagaimana bisa terus berproduksi kemudian pemasarannya juga kemarin dari 8 UMKM yang ada Kalurahan Nglindur itu 8 itu masing- masing padukuhankan punya kelompok UMKM dengan jenis produksi macam- macam juga berbeda-beda tapi masih didominasi oleh produk makanan. Jadi, sebenarnya untuk kerajinan juga sebenarnya harusnya ada tetapi selama ini kelompok – kelompok itu baru jenis makanan atau kuliner dan kita upayakan untuk karena makanan itu kan juga butuh yang Namanya lebeling ya halal, terus P-IRT, izin peoduksi dan Alhamdulillah sudah dari 8 itu sudah memiliki lebel izin produksi yang P-IRT. Kemudian yang halal itu juga baru 5 kalau kelompok kalau ga salah, kemudian yang 3 lagi itu kemarin juga proses untuk mendapatkan lebel halal dari kementerian agama, kemudian juga kaitan pemasaran kita pemerintah kalurahan juga kita mengupayakan bagaimana kelompok UMKM yang ada di Nglindur ini bukan hanya berproduksi kemudian mereka juga kesulitan, tapi mereka kesulitan untuk memasarkan. Dan Alhamdulillah ini ada infrastuktur rest area itu dan kita bersyukur itu bisa sebagai sarana untuk memasarkan juga. Di res area itukan ada lapak untuk jualan terutama untuk yang kuliner itu.” (Rabu, 23 Agustus 2023).

Menurut Lurah Ngelindur UMKM memerlukan dukungan khususnya dari pemerintah desa, dalam hal ini masyarakat yang melakukan aktifitas produksi atau pelaku UMKM berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam hal ini pemerintah mendanai dan memberdayakan setiap pelaku UMKM agar dapat terus memproduksi dan memasarkan produknya. Dari 8 padukuhan yang ada di Kalurahan Ngelindur semuanya memiliki UMKM yang didominasi oleh produk makanan dan masih terus aktif berjalan. Sehingga diusahakan untuk penambahan produk seperti kerajinan namun belum dapat terlaksana karena harus berfokus terlebih dahulu pada produk makanan atau kuliner karena tentu saja membutuhkan labeling yang halal dan juga perizinan (P-IRT). Untuk izin usaha sendiri sudah memiliki label dan izin produksi yang P-IRT, produk dengan sertifikasi halal 5 UMKM dan 3 lainnya dalam proses untuk mendapatkan label halal dari kementerian agama. Kemudian kaitannya dengan pemasaran yang diusahakan untuk dapat memasarkan produk UMKM, selanjutnya dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa rest area memudahkan para pelaku UMKM dengan memanfaatkan sarana tersebut untuk membuka lapak untuk berjualan.

Penjelasan terkait faktor-faktor yang mendukung proteksi pemerintah desa oleh

Ketua UMKM Surami :

” Potensinya yang jelas dari alamnya itu sumber daya alamnya terus yang kedua itu dari segi pelaku usahanya itu saja. Untuk sumber daya ada terus istilahnya potensi yang dari alamnya juga ada. Jadi misalkan potensinya itu bahan-bahan lokal ada. Karena ini yah kebetulan UMKM yang sudah ini hanya kuliner, jadi bahan-bahannya ada di desa jadi belum kerajinan. Kerajinan yang ada baru kerajinan bambu itupun masih jarang dan itu ada juga disini kita tidak mencari keluar itukan potensinya ada” (Rabu, 23 Agustus 2023)

Menurut ketua UMKM potensi yang dimiliki tentu saja berasal dari sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Potensi yang tersedia sangat memadai sehingga menunjang setiap aktivitas produksi UMKM yang berfokus pada

produk kuliner selain itu ada juga produk kerajinan namun belum banyak produksi atau masih jarang.

“ Untuk pemerintah Kalurahan itu benar-benar sangat membantu, dalam hal ini baik mengupayakan bagaimana kelompok UMKM itu bisa berjalan dan tentang bahan bakunya itu pemerintah kalurahan juga ikut, jadi tidak diserahkan apa keperluan kelompok itu bukan kelompok saja yang ini Ketika kelompok butuh ini juga pemerintah bisa membantu mengupayakan entah nanti di carikan bantuan entah nanti di istilahnya pelaku usaha dan petani itu bagaimana cara kerjasamanya jadi pemerintah mengupayakan itu jadikan misalkan kita UMKM perlu jahe, ya pemerintah mendorong sih petani jahe bagaimana cara menanam jahe agar bisa mencukupi UMKM itu misalkan yang dari ketela olahan ketela bagaimana petani ketela ini bisa mencukupi kebutuhan UMKM yang bahan bakunya ketela gitu jadi pemerintah sangat sudah mulai bisa memfasilitasi, sudah bisa membantu perannya sudah mulai banyak. Ini sudah mulai ada pelatihan-pelatihan IT untuk pengusaha jadikan kemarin kan hanya istilahnya cuman ke pasar di bawah tapi bagaimana cara kita melakukan pemasaran itu menggunakan teknologi jadi ini mau ada rencana pelatihan tentang menggunakan yang teknologi seperti usulan online dan lain-lain lewat seperti anak sekarang kan harapannya tidak ketinggalan dengan yang diluar Ketika yang diluar penawarannya lewat tiktok kita cuman lewat halo-halo lewat pasar tapi sudah ada rencana untuk pelatihan-pelatihan pada pelaku UMKM.” (Rabu, 23 Agustus 2023).

Selanjutnya menurut ketua UMKM memngatakan bahwa pmerintah Kalurahan Ngelindur benar benar membantu mengupayakan kelompok UMKM dapat berjalan dan memberikan kontrinusi bahan baku kepada pelaku UMKM, selain itu pemerintah memerhatikan seluruh UMKM, dan memberikan bantuan lainya yang dibutuhkan oleh UMKM nantinya. Sejauh ini pemerintah Kalurahan juga sudah memfasilitasi pelaku UMKM dalam mendapatkan askses seperti pelatihan-pelatihan IT untuk pengusaha, dalam pelatihan tersebut masyarakat diarahkan untuk memasarkan produk melalui E-Comers.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendukung dari informan dapat dilihat bahwa faktor pendukung berupa Potesnsi dalam ada dua yaitu sumber daya alam (SDA) dan juga sumber daya manusia (SDM) potensi ini menjadikan palaku usaha UMKM semakin giat karena ketersediaan bahan pangan yang mencukupi dan juga keahlian yang memadai. Hal-hal yang telah disebutkan tadi merupakan faktor pendorong dari potensi yang ada selanjutnya dari segi

pemerintah kalurahan, pemerintah kalurahan mengupayakan pelabelan atau sertifikasi halal untuk produk makanan yang ada selain itu ada juga izin usaha seperti P-IRT.

Kedua, faktor-fakto yang menghambat proteksi peerintah kalurahan menurut beberapa informan. Penjelasan terkait faktor-faktor yang menghambat proteksi pemerintah desa oleh Pak M.Hanan Amsori, S.IP selaku Lurah Kalurahan Nglindur :

”Ya untuk kendala pasti ada, kendala itu memang kendalanya kalau seperti UMKM itukan kalau bahan baku saya kira tidak bermasalah karena yang diproduksi itu memang bahan bakunya , bahan dasarnya memang ada di sekitar kita di Kalurahan Nglindur itu. Tapi memang kendalanya untuk pemasaran itu, kemudian pemasaran juga kita selain dari kelompok masing- masing UMKM itu dengan karena sudah ada media sosial, ada IG dan lain sebagainya bisa untuk istilahnya wahana untuk pemasarnnya kemudian yang lebih penting lagi kalau jualan itukan menarik, nah dari hasil produksi itu memang masih terkendala pada packing, kemasannya, kemarin kita audiensi dengan pihak dinas perindustrian koperasi kabupaten bagaimana hasil produksi UMKM di Nglindur itu bisa menembus pasar selain ya artinya paling tidak untuk UMKM itu bisa menembus pasar seperti indomaret alfamart itu, nah, kemarin dari pihak dinas terkait itu sudah berkomunikasi dengan indomaret pada waktu itu, kurasi produk kemarin yang kita ajukan itu yang minuman jahe instan itu. Cuman memang ya disini kemasannya kurang menarik dari pihak indomart, untuk lebelnya memang sudah halal dan P-IRT, kemarin dari indomaret itu memang dari sisi kemasannya yang kurang satu itu ya” (Rabu, 23 Agustus 2023).

Terkait faktor penghambat berdasarkan data informan antara lain menurut Lurah yaitu kendala yang mana sampai saat ini terkait dengan pemasaran produk UMKM namun sejauh ini sudah adanya upaya upaya dari pemerintah untuk memasarkan produk UMKM melalui media sosial tentu saja dalam memasarkan produk harus memiliki packaging yang baik dan menarik. Selain itu dari pihak pemerintah desa juga melakukan audiensi dengan pihak dinas perindustrian koperasi kabupaten terkait dengan pemasaran produk hingga tembus ke indomaret atau alfamart, namun dalam hal ini produk UMKM belum dapat masuk karena packaging yang kurang menarik sehingga belum dapat dipasarkan di Indomaret atau Alfamart.

Penjelasan terkait faktor-faktor yang menghambat proteksi pemerintah desa oleh Carik Nglindur Rina Nur Hasanah S.Pd :

” Oh kendala itu yang jelas saat ini itu pemasaran yang bisa sampe keluar daerah jadi tidak hanya di lokal aja. Misalnya saja di Nglindur Kulon itu ada UMKM itu produknya jenang dan apa namanya itu sagun. Seperti yang Gangsalanglor itu kan produknya tidak dapat bertahan lama nah jadi itu hanya untuk skala ini aja skala lokal saja pemasarannya hanya skala lokal. Kalau untuk apa namanya jumlah produksinya itu sudah lumayan karena di wilayah sendiri ini yang Nglindur dan sekitarnya itu sudah menggunakan itu semua kalau orang hajatan itu sudah produk lokal semua mas jenang dan engko babatnya nah itukan kendalanya dalam hal pengawetan seperti itukan kalo di awetkan juga tidak bisa mas ya paling bertahan paling lama lima hari ya itu kendalanya itu kalo. Kemudian pemasaran keluar juga sulit karena itu tadi produk yang tidak bisa bertahan lama karena tanpa pengawet juga. Ya mungkin hanya itu kalau tanda tangan seperti perizinan dan sebagainya itukan biasanya label halal seperti kemarin itu dari apa Kemenag atau dari apa yang kemarin itu juga kan lewatnya desa mas kita menginfentalisir siapa saja yang punya UMKM kita ikutkan untuk mengurus label halal.” (Rabu, 23 Agustus 2023).

Terkait dengan kendala carik sependapat dengan lurah dimana faktor penghambat sejauh ini ialah pemasaran yang jangkauan belum luas atau dapat dikatakan hanya di lingkup kalurahan saja, produk yang di jual juga masih sangat lokal dan masa kadaluarsanya sangat cepat kurang lebih satu minggu sehingga sulit untuk dipasarkan ke luar daerah. Biasanya produk tersebut dijual di sekitaran kalurahan seperti ketika ada kegiatan atau acara seperti hajatan dan lainnya. Terkait dengan pengaweta juga tidak dapat digunakan karena produk tersebut berupa makanan dan dapat memberikan efek samping yang tentu saja bisa merusak nama produk makanan yang telah berjalan sejauh ini.

Berdasarkan data informan penghambat sejauh ini masih berupa pemasaran dan juga produk yang tidak dapat bertahan lama atau mudah kadaluarsa sehingga belum dapat di pasarkan ke luar daerah sehingga masih perlu perhatian terkait dengan pemasaran, penggunaan e-commerce juga menjadi satu solusi dalam pemasaran produk UMKM.

C. Pemberdayaan pelaku UMKM melalui potensi yang ada serta meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing di Kalurahan Nglindur

Pemerintah Desa merupakan salah satu faktor penting dalam Upaya untuk membebaskan UMKM dari situasi sulit. Sebab Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus setiap persoalan dalam Masyarakat. Salah satu makna

Pemerintah Desa adalah proteksi. Proteksi artinya melindungi dan membuka akses bagi orang-perorangan atau rakyat untuk mengakses seperti akses modal, meraih kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperoleh informasi, kesempatan berusaha, kesempatan mengakses sumber daya alam, dan sebagainya.

Saat ini UMKM mengalami berbagai persoalan baik dalam hal pemasaran maupun tampilan produk. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kalurahan perlu melakukan sebuah tindakan tegas baik itu di representasikan melalui kebijakan yang dibuat ataupun melalui program kegiatan khusus untuk pemberdayaan UMKM. Untuk penjelasan terkait pemberdayaan pelaku UMKM akan dijelaskan sebagai berikut :

Penjelasan terkait pemberdayaan pelaku UMKM oleh Pak M.Hanan Amsori, S.IP selaku Lurah Kalurahan Nglindur :

“Untuk mendorong tentunya kami juga tidak kurang juga dari kayak pemberdayaan kemudian juga perolehan lebel P-IRT halal dan juga tempat usaha salah satunya di Rest Area itu salah satu Upaya kami pemerintah kalurahan atau pemerintah desa untuk mendorong UMKM itu lebih aktif lagi lebih produktif lagi karena memang sarannya sudah ada selain dari mereka sendiri secara online dan nanti di lapak Rest Area itu kita berikan satu lokasi untuk display hasil produksi dari UMKM tersebut yang tentunya nanti bisa memperkenalkan dari hasil produksi itu kepengunjung Rest Area salah satu Upaya dari pemerintah kalurahan untuk mendorong agar ya biar termotivasi” (Rabu, 23 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Hanan selaku Lurah Kalurahan Nglindur, beliau menjelaskan bahwa untuk mendorong UMKM agar tetap maju dan berkembang, pemerintah kalurahan telah memfasilitasi UMKM dengan menyediakan lokasi atau lapak di Rest Area sebagai bentuk untuk mempromosikan hasil produksi UMKM kepada para pengunjung sekaligus sebagai bentuk untuk memperkenalkan produk usaha kepada masyarakat luas (konsumen). Rest Area itu sendiri di Kelola oleh BAMUSKAL yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan pemuda Karang Taruna dalam pengelolaan Rest Area.

Selanjutnya hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu Rina Nur Hasanah, S.Pd selaku Carik Kalurahan Nglindur. Kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Dengan adanya Rest Area yang di Kelola BUMDesa, maka yang diprioritaskan adalah pelaku UMKM untuk membuka lapak di Rest Area. Dan dalam melibatkan masyarakat mendukung UMKM kami sering melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat di Rest Area. Dengan demikian masyarakat bisa membeli produk-produk UMKM di sana” (Rabu, 23 Agustus 2023).

Berdarkan hasil wawancara bersama ibu Rina selaku Carik Kalurahan Nglindur, beliau menjelaskan bahwa, pemerintah kalurahan telah memfasilitasi para pelaku UMKM dengan menyediakan lapak yang ada di Rest Area. Selain pengunjung yang datang dan membeli hasil produksi, pemerintah kalurahan juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan di Rest Area, kegiatan-kegiatan tersebut tidak lupa juga masyarakat di ikut sertakan di kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah kalurahan sebagai bentuk untuk mendukung UMKM agar tetap maju. Kegiatan yang dilakukan di Rest Area tersebut bertujuan untuk memberi informasi kepada pemerintah dan masyarakat yang hadir di tersebut bahwa UMKM telah hadir di Rest Area dan di harapkan untuk dapat membelinya sebagai bentuk apresiasi atau dukungan kepada para pelaku usaha agar para pelaku tetap semangat dalam memproduksi hasil produksinya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama dengan Pak Drs. Sugeng Wibowo, M.Pd.I selaku Ketua BPD Kalurahan Nglindur. Kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Kalau yang khusus dari pemerintah secara identik memang belum, tetapi secara tersirat memang memberikan motivasi kepada seluruh UMKM untuk inovasi untuk menggunakan media sosial untuk promosi menggunakan jasa online dan sebagainya” (Sabtu, 26 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Sugeng, beliau menjelaskan bahwa memang ada pemberian motivasi dari pemerintah kalurahan kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya. Namun dari kutipan wawancara diatas jelas bahwa, pemerinta kalurahan belum sepenuhnya melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam

mendukung UMKM, karena tidak adanya pelatihan terkait manajemen organisasi, teknik marketing sebagai bentuk untuk bisa masuk bersaing di pasar-pasar yang lebih luas, melakukan pendampingan kepada para pelaku agar para pelaku usaha bisa tahu apa yang seharusnya dilakukan atau menetapkan langkah awal untuk mengembangkan produk usaha, pelatihan terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia para pelaku usaha agar mampu mandiri sendiri agar apabila terjadi persoalan dalam tubuh organisasi (UMKM) mereka dapat menyelesaikan secara mandiri.

Selanjutnya wawancara bersama Ibu Surami selaku ketua UMKM tingkat Kalurahan Nglindur. Kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Gini mas, sebenarnya itu kami dari pihak UMKM itu membutuhkan masukan atau pendampingan dari pihak pemerintah kalurahan terkait kemajuan yang diperoleh sejak awal berusaha sampai sekarang kira kira apa yang mau dibenahi dan langkah apa yang di ambil untuk mengantisipasi misalnya ada persoalan gitu mas, istilahnya melakukan evaluasi gitu mas cuman dari pemerintah kalurahan sendiri memang kaya acu tak acu padahal terkait persoalan yang kami hadapi itu mas sudah kami sampai berulang kali ke mereka pemerintah cuman gak ada respon balik dari pemerintah mas jadi kami bingung langkah apa yang harus kami ambil mas apalagi kami sendiri mengalami persoalan terkait pemasaran dan juga tampilan produk yang masih istilahnya biasa-biasa saja belum wao gitu jadi produk kami itu tidak terlalu diminati paling hanya masyarakat Nglindur sini yang membeli mas kira kira gitu mas” (Rabu, 23 Agustus 2023)

Selanjutnya wawancara bersama ibu Karsini selaku ketua dua (2) usaha Jahe Emperit. Kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Bahan baku kan kita memang ini kan jahe kan, diberi misal dari sumbernya ada petani mungkin ada petani jahe disana kita butuh kita diberi arahan, kesana biar ininya agak harganya agak lumayan ga terlalu mahal gitu, kalau ambil dari petani langsung kan lumayan ga terlalu mahal, lain kalau udah masuk di pasar itu mungkin harganya sudah lumayan mahal”

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Karsini tersebut, beliau menjelaskan bahwa pemerintah kalurahan mendekatkan diri dengan para petani guna untuk melakukan kerja sama guna untuk membantu para pelaku UMKM untuk menyediakan bahan baku atau bahan mentah berupa jahe dan bahan baku tersebut nantinya akan di beli oleh para pelaku

UMKM namun harganya tidak sesuai harga pasaran atau bisa dibilang harganya lebih rendah dari harga pasaran. Bisa di lihat bahwa ada upaya dari pemerintah kalurahan untuk mencari alternatif untuk membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan bahan baku dari para petani sekaligus membantu para petani untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari para pelaku UMKM karena telah bersedia membantu mensubsidi bahan baku jahe untuk keperluan produksi.

Selanjutnya wawancara bersama Ibu Sulastri selaku ketua UMKM Kacang Oven, kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau di tempat saya khususnya itu, kalau lewat digital itu belum bisa. Kacang oven kalau di tempat saya dan juga pernah kami keluhkan ke pemerintah kalurahan terkait tampilan produk kami karena beberapa waktu lalu itu kan sempat ada kunjungan dari Kementrian Sosial mas, pihak kementrian menyampaikan terkait tampilan produk kalau mau masuk ke pasar pasar gitu mas tampilannya harus bisa memikat para pembeli dan hal ini sudah kami sampaikan ke pemerintah kalurahan namun sampai hari ini belum ada tindakan atau respon balik ke kami kira-kira apa yang harus kami lakukan karena kami juga kekurangan modal buat beli bahan yang lebih bagus lagi untuk tampilan produk kami kira-kira gitu mas” (Rabu, 23 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Sulastri selaku ketua UMKM Kacang Oven, bisa dilihat bahwa kurangnya perhatian dari pemerintah kalurahan terkait keluhan yang di sampaikan oleh para pelaku UMKM terkait inovasi produknya. Kita tahu bahwa suatu usaha tidak akan berjalan apabila tidak mendapat dukungan dari pihak yang lebih kuat yang artinya bahwa pemerintah kalurahan selaku aktor pembangunan harus bisa mensupport tidak hanya memfasilitasi terkait menyediakan lokasi untuk pemasaran produk saja tetapi juga harus bisa terbuka dan mendukung para pelaku UMKM apabila ada keluhan yang di sampaikan. Makna mengatur dan mengurus di sini ada satu fungsi yakni pemberdayaan masyarakat yang artinya bahwa pemerintah harus mampu memberdayakan masyarakat agar semakin kuat dan bisa berdaya atau kuat agar dapat memanfaatkan potensi lokal yang ada, apabila masyarakat telah mampu memanfaatkan potensi lokal yang ada, pemerintah kalurahan harus mampu mendorong, mendukung masyarakat agar masyarakat semakin

kuat, tidak boleh melepas masyarakat untuk berjalan sendiri tanpa di damping sebab tujuan pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat agar semakin berdaya, jadi perlu dilakukan dorongan, pemberian motivasi yang dilakukan secara bertahap atau berkelanjutan. Maka dari itu pemerintah perlu mendukung para pelaku UMKM tidak hanya lewat bantuan modal atau fasilitasi saja tetapi juga harus mampu merespon apa yang dikeluhkan oleh para pelaku UMKM agar persoalan yang sedang di hadapi bisa dicari jalan keluarnya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Suranta selaku Tokoh Masyarakat Kalurahan Nglindur, kutipan wawancara sebagai berikut:

“Ya setau saya kendalanya itu pemasaran belum sebaik yang lainnya karena kalau untuk, khususnya untuk kacang oven itu produknya itu belum, pemasarannya belum meluas cuma yang banyak itu untuk orang hajatan di sekeliling girisubo sini ya ada di rongkop, kalau di daerah Girisubo sudah lumayan pemesan- pemesan yang dibutuhkan oleh warga Masyarakat” (Minggu, 27 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Suranta selaku Toko Masyarakat, beliau menyampaikan bahwa khusus UMKM kelompok usaha Kacang Oven memiliki kendala yakni di pemasaran produk, yang dimana terkait pemasaran itu masih di seputaran Kapanewon Girisubo dan juga Rongkop itu pun apabila ada kegiatan hajatan. Hal ini bisa diketahui bahwa persoalan pemasaran merupakan salah satu persoalan yang wajib diperhatikan secara serius dikarenakan salah satu mata pencaharian masyarakat terkhususnya para pelaku usaha ialah UMKM Kacang Oven ini. Selain omset dari hasil penjualan digunakan untuk tambahan modal untuk membeli produk dan alat produksi, ada dana yang di cairkan untuk membantu para pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga patut diperhatikan lebih serius oleh pemerintah kalurahan agar bisa di cari alternatif untuk membantu para pelaku UMKM untuk menitipkan hasil produksi UMKM-nya sehingga produk dari UMKM tidak hanya berputar di area

Kapanewon Girisubo dan Rongkop saja melainkan bisa juga menjangkau di daerah sekitaran Gunungkidul.

Selanjutan wawancara bersama Ibu Rena Tri Nur Widyastuti selaku masyarakat, kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“ perlu di galakan alatnya itu, memfasilitasi alat-alat ke desa-desa ke dusun-dusun itu lebih lengkap lagi biar pembuatan UMKMnya itu lebih berkembang dan bisa memajukan ekonomi Masyarakat khususnya yang berdagang usaha, kalo menurut saya sebagai Masyarakat” (Minggu, 27 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Rena selaku masyarakat, beliau menyampaikan bahwa perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah kalurahan terkait penyediaan atau memberi bantuan alat produksi dikarenakan alat produksi yang di miliki oleh setiap kelompok UMKM yang tersebar di setiap Padukuhan belum sepenuhnya lengkap atau bisa di bilang alatnya belum lengkap sehingga bisa menjadi faktor penyebab kelambatan dalam proses produksi karena kebanyakan proses produksinya masih bersifat manual atau tradisional menggunakan alat seadanya sehingga perlu adanya subsidi alat produksi dari pemerintah kalurahan.

Dari hasil wawancara di atas dapat di ambil kesimpulannya bahwa, pemerintah kalurahan dalam mendukung UMKM, pemerintah kalurahan memfasilitasi para pelaku dengan menyediakan lapak penjualan khusus UMKM di Rest Area sebagai bentuk untuk mempromosikan hasil produksi kepada para pengunjung serta masyarakat yang berkunjung ke Rest Area. Selain itu juga pemerintah kalurahan memberi kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau ivent-ivent yang di selenggarakan di tingkat kalurahan, kapanewon maupun ivent-ivent yang di laksanakan di Wonosari. Salah satu makna pemerintah ialah proteksi. Proteksi artinya melindungi dan membuka akses bagi orang-perorangan atau rakyat untuk mengakses seperti akses modal, meraih kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperoleh informasi, kesempatan

berusaha, kesempatan mengakses sumber daya alam, dan sebagainya. Tujuannya adalah melindungi rakyat jelata dari sekelompok kecil elit (baik ekonomi maupun politik) (Sutoro Eko, 24 Oktober 2020). Pemerintah kalurahan dalam melindungi para pelaku UMKM dengan memberi kesempatan untuk berusaha, mengakses modal seperti yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam mengupayakan untuk mendapatkan bantuan anggaran dari Kementerian Sosial guna untuk mengembangkan UMKM. Dengan adanya bantuan anggaran dari Kementerian Sosial sebesar Rp 30.000.000 tersebut di alihkan ke bantuan berupa alat produksi yang dibagikan kepada setiap kelompok UMKM yang tersebar di setiap Padukuhan. Walaupun tidak adanya program kegiatan yang dikhususkan untuk pemberdayaan UMKM, tetapi pemerintah kalurahan terus berupaya untuk mencari alternatif baik berupaya untuk meminta bantuan anggaran atau modal dari Kementerian Sosial dan juga berupaya untuk berkolaborasi dengan para petani guna untuk menyediakan bahan baku berupa jahe untuk membantu para pelaku dalam kelancaran berproduksi.

BAB IV

KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Proteksi Pemerintah Desa Terhadap Eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka akan di ambil kesimpulan terkait Proteksi Pemerintah Desa Terhadap Eksistensi UMKM dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proteksi Pemerintah Terhadap Eksistensi UMKM

Proteksi itu sendiri artinya melindungi dan membuka akses bagi orang-perorangan atau rakyat untuk mengakses seperti akses modal, meraih kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperoleh informasi, kesempatan untuk mengakses sumber daya alam dan sebagainya yang artinya bahwa, pemerintah tidak hanya menunggu laporan dari pihak UMKM baru bertidak melainkan pemerintah kalurahan harus mampu melindungi sesuai makna pemerintah yakni proteksi. Dari berbagai data, baik itu hasil wawancara maupun pengamatan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa Proteksi Pemerintah Kalurahan Terhadap Eksistensi UMKM masih lemah karena belum bisa merespon berbagai kebutuhan para pelaku usaha baik itu dilihat dari kebutuhan terkait peningkatan kualitas produk, kemasan atau tampilan produk dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia para pelaku usaha. Dilihat dari segi perencanaan juga masih belum optimal dilakukan sehingga Pemerintah Kalurahan juga melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan para petani dan pelaku UMKM untuk menyediakan bahan baku sebagai penunjang keberlangsungan aktifitas produksi UMKM.

2. Faktor-faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Proteksi Pemerintahan Desa Terhadap Eksistensi UMKM Di Kalurahan Nglindur.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendukung dari informan dapat dilihat bahwa faktor pendukung berupa Potensi dalam ada dua yaitu sumber daya alam (SDA) dan juga sumber daya manusia (SDM) potensi ini menjadikan palaku usaha UMKM semakin giat karena ketersediaan bahan pangan yang mencukupi dan juga keahlian yang memadai. Hal-hal yang telah disebutkan tadi merupakan faktor pendorong dari potensi yang ada selanjutnya dari segi pemerintah kalurahan, pemerintah kalurahan mengupayakan pelabelan atau sertifikasi halal untuk produk makanan yang ada selain itu ada juga izin usaha seperti P-IRT. Berdasarkan data informan penghambat sejauh ini masih berupa pemasaran dan juga produk yang tidak dapat bertahan lama atau mudah kadaluarsa sehingga belum dapat di pasarkan ke luar daerah sehingga masih perlu perhatian terkait dengan pemasaran, penggunaan e-commerce juga menjadi satu solusi dalam pemasaran produk UMKM.

3. Pemberdayaan Pelaku UMKM Melalui Potensi Yang Ada Serta Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dan Meningkatkan Daya Saing Di Kalurahan Nglindur

Berdasarkan data, baik itu hasil wawancara bersama beberapa informan dan juga pengamatan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan dalam mendukung UMKM, Pemerintah Kalurahan memfasilitasi para pelaku dengan menyediakan lapak penjualan khusus UMKM di Rest Area sebagai bentuk untuk mempromosikan hasil produksi kepada para pengunjung serta masyarakat yang berkunjung ke Rest Area. Pemerintah kalurahan dalam melindungi para pelaku UMKM dengan memberi kesempatan untuk berusaha, mengakses modal seperti yang di lakukan oleh pemerintah kalurahan dalam

mengupayakan untuk mendapatkan bantuan anggaran dari Kementerian Sosial guna untuk mengembangkan UMKM.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti ingin memberikan saran sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan kepada Pemerintah Kalurahan Nglindur. Sesuai dengan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya peneliti akan menarik kesimpulan terkait Proteksi Pemerintah Desa Terhadap Eksistensi UMKM dari hasil yang telah diteliti, ada beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Nglindur juga harus bisa menjalankan makna pemerintah yakni proteksi yakni melindungi dan membuka akses seperti akses modal, meraih kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk memperoleh informasi, kesempatan untuk mengakses sumber daya alam dan sebagainya dengan tujuan untuk melindungi rakyat jelata dari sekelompok elit (baik ekonomi maupun politik).
2. Pemerintah Kalurahan Nglindur seharusnya memberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi modern untuk proses produksi maupun dalam hal pemasaran produk.
3. Perlu adanya peningkatan partisipasi dari masyarakat terhadap UMKM karena UMKM merupakan salah satu potensi ekonomi yang apabila dikembangkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.

4. Pemerintah Kalurahan perlu mengeluarkan regulasi atau peraturan terkait perlindungan dan juga pengembangan UMKM
5. Pemerintah Kalurahan perlu melakukan pembinaan terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia para pelaku UMKM
6. Perlu adanya pendampingan yang dilakukan dari pihak pemerintah kalurahan terkait manajemen pengelolaan organisasi
7. Perlu dilakukan pelatihan terkait teknik marketing sehingga UMKM bisa maju bersaing di pasar
8. Perlu adanya peningkatan kualitas produk
9. Perlu adanya keterbukaan antara para pelaku UMKM dan pemerintah kalurahan
10. Perlu dilakukannya evaluasi sebagai bentuk untuk melihat sudah sejauh mana UMKM berkembang dan juga untuk mengantisipasi berbagai persoalan di hari depan serta menetapkan langkah yang tegas dalam penanganan persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Akida, Saidatul Dkk. Vol 2 No 2 (2022) Jurnal Keberadaan Bumdes Suku Jaya Dalam Pelayanan Masyarakat.

Anggraeni, N. (2017). Nita Anggraeni Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri dalam Konteks Hukum Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO). *Al-Ahkam*, 13(1), 62. <https://doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1749>

Anggelina, Dkk. (2022). Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daroin, Ana Dhaoud. (2015). Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Handycraft Kayu Jati Di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

Garda, Sri Rahayu. Vol 1 No 1 (2020) Jurnal Sosialisasi Hak Cipta dan Hak Merek pada Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar).

Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (n.d.) Tidak ada analisis struktur kovarians dari indikator terkait kesehatan untuk lansia yang tinggal di rumah dengan fokus pada rasa subjektif terhadap kesehatan Judul 7823–7830.

Kencana, Novia Dkk. Vol 4 No 2 (2019) Jurnal Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pertumbuhan Ekonomi Lokal Pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Ujanmas Baru Kec. Ujanmas Kabupaten Muara Enim).

Muksin, Dkk. (2016) Jurnal Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kota Padang; Masalah dan Solusi Pada Usaha Sulaman dan Bordiran.

Putra, Dandi Aprilianto. Jurnal Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumenep.

Rohmah, Fathatur, Dkk. Vol 3 No 12 Jurnal Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo).

Siregar, Gustna, Dkk. (2016). Jurnal Model Pengembangan Komoditas Dan Jenis Usaha Unggulan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

Sitoro, Simunawir. (2022). Jurnal Identifikasi Dan Strategi Pengembangan UMKM Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

Peraturan- peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Website

“Deklarasi Mazhab Timoho dan Peluncuran Jurnal Governabilitas Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta”. (17 Juli 2020). *Admin PPMB*.

<https://stpmd.apmd.ac.id/deklarasi-mazhab-timoho-dan-peluncuran-jurnal-governabilitas-program-studi-ilmu-pemerintahan-stpmd-apmd-yogyakarta/>

“Penelitian Eksploratif: Arti, Ciri, dan Contohnya”. (30 Juli 2022). *Sampoerna University*.

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-eksploratif-arti-ciri-dan-contohnya/>

Sitoresmi, Ayu Rifka. (9 Januari 2023). “Proteksi Adalah Perlindungan Terhadap Produk”.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5175235/proteksi-adalah-perlindungan-terhadap-produk-ini-penjelasan-lengkapny>

Sitoresmi, Ayu Rifka. (18 Januari 2022). ”Eksistensi Adalah Keberadaan, Ketahui Makna dan

Penggunaannya.”<https://www.liputan6.com/hot/read/4863036/eksistensi-adalah-keberadaan-ketahui-makna-dan-penggunaannya> “UMKM”. *Semarang Kota.co.id*,
<https://bugangan.semarangkota.go.id/umkm>

Zia Auralia Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, C., Bhayangkara Jakarta Raya, U., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro: Penggunaan Dana BPUM , Penggunaan Software Akuntansi dan Human Capital. *Jura : Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 118–128. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.389>

PANDUAN WAWANCARA

A. Proteksi pemerintah desa terhadap eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur

1. Bagaimana pemerintah desa Nglindur mendefinisikan UMKM dan apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh usaha untuk masuk dalam kategori tersebut?
2. Apa saja langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah desa untuk melindungi dan mendukung UMKM di wilayah Nglindur?
3. Bagaimana pemerintah desa berkolaborasi dengan UMKM dalam mempromosikan produk dan potensi lokal agar dapat meningkatkan daya saing dan memperluas skala usaha?
4. Apakah ada program atau kebijakan tertentu yang diterapkan pemerintah desa untuk memberikan insentif atau bantuan terhadap UMKM?
5. Bagaimana pemerintah desa mengatasi kendala atau tantangan yang dihadapi UMKM dalam operasional dan pengembangan usaha?
6. Bagaimana pemerintah desa Nglindur melibatkan komunitas dan masyarakat setempat dalam mendukung dan mengembangkan UMKM?
7. Apakah pemerintah desa memiliki program pelatihan atau pengembangan keterampilan untuk membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan pelayanan?
8. Bagaimana pemerintah desa mendorong UMKM untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam usaha mereka?
9. Apakah ada rencana atau strategi jangka panjang yang ditetapkan oleh pemerintah desa untuk memperkuat eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur?
10. Apakah ada program atau kegiatan promosi khusus yang diadakan oleh pemerintah desa untuk memperkenalkan produk UMKM ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional atau internasional?

B. Pemberdayaan pelaku UMKM melalui potensi yang ada serta meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing di Kalurahan Nglindur

1. Bagaimana pemerintah Desa Nglindur memahami esensi dari UMKM dan bagaimana UMKM diidentifikasi dan dipetakan di wilayah tersebut?
2. Apa saja potensi yang ada di Kalurahan Nglindur yang dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan pelaku UMKM?
3. Bagaimana pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi akses pelaku UMKM terhadap potensi lokal yang ada, seperti bahan baku, sumber daya alam atau keahlian khas?
4. Bagaimana program atau kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi bagi pelaku UMKM agar dapat bersaing lebih efektif?
5. Bagaimana pemerintah desa berkolaborasi dengan lembaga pendidikan atau pusat pelatihan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di kalangan pelaku UMKM?
6. Bagaimana pemerintah desa mendorong kolaborasi antar UMKM dalam bentuk koperasi atau jaringan bisnis untuk meningkatkan daya saing dan akses ke pasar?
7. Bagaimana evaluasi dan pemantauan dilakukan oleh pemerintah desa terhadap program-program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan?
8. Bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam mendukung dan memahami pentingnya pemberdayaan UMKM dalam mendukung ekonomi lokal?

9. Apakah ada hambatan atau tantangan tertentu yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM dan bagaimana mengatasi kendala tersebut?
10. Bagaimana dampak dari program pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN (SK) LURAH NGLINDUR

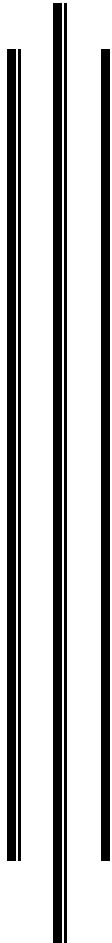


LURAH NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH NGLINDUR

NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS FORUM KESERASIAN SOSIAL NYAWIJI

KALURAHAN NGLINDUR



KALURAHAN : NGLINDUR
KAPANEWON : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LURAH NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH NGLINDUR

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS FORUM KESERASIAN SOSIAL
NYAWIJI KALURAHAN NGLINDUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA LURAH NGLINDUR,

Menimbang :

- a. bahwa Forum Keserasian Sosial merupakan wadah untuk meningkatkan keharmonisan, keserasian dan sosial, serta menumbuhkan dan memperkuat kembali tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi semangat kebersamaan dan kegotongroyongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengukuhan Pengurus Forum Keserasian Sosial Kalurahan Nglindur;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Memperhatikan: Hasil musyawarah Kalurahan Nglindur tanggal 31 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS FORUM KESERASIAN SOSIAL NYAWIJI KALURAHAN NGLINDUR.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Keserasian Sosial Nyawiji Kalurahan Nglindur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Keserasian Sosial Nyawiji Kalurahan Nglindur harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Lurah Nglindur selaku Pembina.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglindur

Pada tanggal 1 September 2022

LURAH NGLINDUR

MUHAMMAD HANAN AMSHORI




LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH NGLINDUR
NOMOR : 47 TAHUN 2022
TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS
FORUM KESERASIAN SOSIAL NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR

PENGURUS FORUM KESERASIAN SOSIAL NYAWIJI KALURAHAN
NGLINDUR

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina 1	M.HANAN AMSHORI, S.IP
2	Pembina 2	TUKIRMAN, S.Pd
3	Ketua	ALIP BINTORO
4	Sekretaris	ARIBOWO
5	Bendahara	SUTRISNO
6	Anggota	SABARI
7	Anggota	DAVID NURVIAN TO
8	Anggota	SURAMI
9	Anggota	KARTINI
10	Anggota	DESI ISTICHOMAH ,S.Pd
11	Anggota	SUDARI

LURAH NGLINDUR



MUHAMMAD HANAN AMSHORI

**LAMPIRAN PEMBERIAN BANTUAN DARI KEMENTRIAN SOSIAL LEWAT
FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) KEPADA PARA PELAKU UMKM**

**BERITA ACARA
FORUM KESERASIAN SOSIAL "NYAWLJI"**



**KALURAHAN : NGLINDUR
KAPANEWON : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**FORUM KESERIASAN SOSIAL (FKS) NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA ACARA
No: 01 /FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMKM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIJI menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan			
2	Kompot tungku			Sumur
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper michoba	1		
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees	1		
8	Peniris	1		
9	Loyang besar			
10	Vavum seller			
11	Etalase Alumunium Kaca			
12	Meja produksi			
13	Nampan plastic	1		
14	Alat pemotong kerupuk	1		
15	Oven listrik			
16	Soblok	1		
17	Vaskom			
18	Mixer adonan			
19	Blender			

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima


.....
SUCI

Nglindur, 25 November 2022
PIHAK I (PERTAMA)
Yang menyerahkan




.....
AIP RANTO

Mengetahui
Lurah Nglindur



**FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA ACARA
No : 01 /FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMKM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIJI menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan			6 angolan kecil
2	Kompot tungku			
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper michoba			
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees	1		
8	Peniris			
9	Loyang besar			
10	Vavum seller			
11	Etalase Alumunium Kaca			
12	Meja produksi			
13	Nampan plastic	1		
14	Alat pemotong kerupuk	1		
15	Oven listrik	1		
16	Soblok			
17	Vaskom			
18	Mixer adonan			
19	Blender			

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima

[Signature]
GAKK A. SULISMI

Nglindur, 25 November 2022
PIHAK I (PERTAMA)
Yang menyerahkan
[Signature]
ALIP BINTORO

Mengetahui
Lurah Nglindur

[Signature]
M. HANAN AMSHORI, S.IP

**FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA ACARA
No. ~~1~~ /FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMKM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIJI menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan			Gangsdan Lor
2	Kompor tungku			
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper michoba			
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees			
8	Peniris			
9	Loyang besar			
10	Vavum seller			
11	Etalase Alumunium Kaca	1		
12	Meja produksi	1		
13	Nampan plastic			
14	Alat pemotong kerupuk	1		
15	Oven listrik			
16	Soblok			
17	Vaskom			
18	Mixer adonan			
19	Blender			

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima

[Signature]

KAD-TIMI



Nglindur, 25 November 2022
PIHAK I (PERTAMA)
Yang menyerahkan

[Signature]

ALIP RINTORO

Mengetahui
Lurah Nglindur



M. HANAN AMSHORI, S.IP

**FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA ACARA
No. 01 /FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMKM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIJI menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan			Wuji
2	Kompor tungku			
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper michoba			
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees			
8	Peniris			
9	Loyang besar	1		
10	Vavum seller	1		
11	Etalase Alumunium Kaca			
12	Meja produksi			
13	Nampun plastic	1		
14	Alat pemotong kerupuk	1		
15	Oven listrik			
16	Soblok			
17	Vaskom			
18	Mixer adonan	1		
19	Blender	1		

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima

(Handwritten signature)

(Resumaning S.Yu)

Nglindur, 25 November 2022
PIHAK I (PERTAMA)
Yang menyerahkan

(Handwritten signature)
ALIP RANTORO

Mengetahui
Lurah Nglindur


M. HANAN AMSHORI, S.IP

**FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) NYAWIH
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIBSUBO
KABUPATEN GUNUNGRIDUL**

BERITA ACARA
No : 01 /FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMKM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIH menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan			TeXIX
2	Kompor tungku			
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper nichoba			
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees			
8	Peniris			
9	Loyang besar	1		
10	Vacum seller	1		
11	Etalase Aluminium Kaca			
12	Meja produksi			
13	Nampan plastic			
14	Alat pemotong kerupuk			
15	Oven listrik	1		
16	Soblok	1		
17	Vaskom	1		
18	Mixer adonan			
19	Blender			

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima


SULA-STRI

Nglindur, 25 November 2022
PIHAK I (PERTAMA)
Yang menyerahkan


ALIP RINTORO

Mengetahui
Lurah Nglindur


M. HANAN AMSHORI, S.IP

**FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA ACARA
No: 61/FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMKM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIJI menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan	1		Nglindur Kulon
2	Kompor tungku			
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper michoba			
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees	1		
8	Peniris			
9	Loyang besar	1		
10	Vavum seller			
11	Etalase Aluminium Kaca			
12	Meja produksi	1		
13	Nampun plastic			
14	Alat pemotong kerupuk			
15	Oven listrik			
16	Soblok			
17	Vaskom	1		
18	Mixer adonan			
19	Blender			

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima

[Signature]
SUDATI



Nglindur, 25 November 2022
PIHAK I (PERTAMA)
Yang menyerahkan

[Signature]
ALIP RANTUDO

Mengetahui
Lurah Nglindur



M. HANAN AMSHORI, S.IP



FORUM KERESASIAN SOSIAL "NYAWIJI"
KALURAHAN NGLINDUR, KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGGIDUL, DI. YOGYAKARTA
Jalan Sadeng Km. 4,5 Nglindur, Girisubo, Gunungkidul, KP : 55883

REKAP PENYERAHAN ALAT UMKM

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	BARANG DITERIMA	JUMLAH	SATUAN
1	Dawis 04	Nglindur Wetan	Wajan	1	Buah
			Kompot Tungku	1	Buah
			Regulator, Gas Dan Selang	1	Set
			Timbangan	1	Buah
			Nampan Plastik	1	Buah
			Chooper Michoba	1	Unit
			Waskom Stanless	1	Buah
2	Maju Berkah	Sumur	Chooper Michoba	1	Unit
			Waskom Stanless	1	Buah
			Peniris	1	Buah
			Alat Pemotong Kerupuk	1	Buah
			Soblok	1	Buah
3	Sami Roso	Nglindur Kulon	Wajan	1	Buah
			Loyang Besar	1	Buah
			Meja Produksi	1	Buah
			Vaskom	1	Buah
4	Hikmah	Ngepoh	Loyang Besar	1	Buah
			Meja Produksi	1	Buah
			Oven Listrik	2	Unit
			Vaskom	1	Buah
			Peniris	1	Unit
5	Guyup	Gangsalan Kidul	Waskom Stanless	1	Buah
			Alat Pemotong Kerupuk	1	Buah
			Oven Listrik	1	Unit
6	Sari Rejeki	Gangsalan Lor	Etalase Aluminium Kaca	1	Unit
			Meja Produksi	1	Buah
			Alat Pemotong Kerupuk	1	Buah
7	Mekar Snack	Wuni	Alat Pemotong Kerupuk	1	Buah
			Vacum Seller	1	Buah
			Waskom Plastik	1	Buah
			Mixer Adonan	1	Buah
			Blender	1	Buah
8	Srikandi	Tekik	Loyang Besar	1	Buah
			Vacum Seller	1	Buah
			Oven Listrik	1	Unit
			Vaskom	1	Buah
			Soblok	1	Buah

Mengetahui :
Kalah

MUHAMMAD HANAN AMSHORI, S.IP

Nglindur, 25 November 2022
Ketua

ALIP BINTORO

DOKUMENTASI



**Gambar 1 Wawancara Bersama M. Hanan Amsori, S.IP, Selaku Lurah
Nglindur
(Rabu, 23 Agustus 2023)**



**Gambar 2 Wawancara Bersama Rina Nur Hasanah, S.Pd, Selaku Carik
(Rabu, 23 Agustus 2023)**



**Gambar 3 Wawancara Bersama Totok Wahyudi, Selaku Danarta Nglindur
(Rabu, 23 Agustus 2023)**



**Gambar 4 Wawancara Bersama Drs. Sugeng Wibowo, M.Pd.I, Selaku Ketua
BPD Nglindur
(Sabtu, 26 Agustus 2023)**



**Gambar 5 Wawancara Bersama Surami, Selaku Ketua UMKM Nglidur
(Rabu, 23 Agustus 2023)**



**Gambar 6 Wawancara Bersama Sulastri, Selaku Anggota UMKM Nglidur
(Rabu, 23 Agustus 2023)**



**Gambar 7 Wawancara Bersama Karsini, Selaku Anggota UMKM Nglindur
(Sabtu, 26 Agustus 2023)**



**Gambar 8 Wawancara Bersama Suranta, Selaku Tokoh Masyarakat Nglindur
(Minggu, 27 Agustus 2023)**



**Gambar 9 Wawancara Bersama Rena Tri Nur Widyastuti, Selaku Masyarakat
Nglindur
(Minggu, 27 Agustus 2023)**